

E-ISSN: 2580-9644

P-ISSN: 1978-9378

QAWWAM

Journal for Gender Mainstreaming

Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2020

E-ISSN: 2580-9644

P-ISSN: 1978-9378

QAWWAM

Journal for Gender mainstreaming

Pelindung	: Prof. Dr. H. Mutawali, M. Ag
Pengarah	: Muhammad Sai, MA
Penanggung jawab	: Dr. Emawati, M.Ag
Ketua penyunting	: Iqbal Bafadal, M.Si
Mitra Bestari	: 1. Prof. Dr. Sulistio Irianto, M.A (Universitas Indonesia) 2. Dr. H. Marzuki Wahid, M.A (FAHIMA Institute Bandung) 3. Dr. H. Wawan Djunaidi, M.A (STAINU Jakarta) 4. Zusiyan Elly Triantini, M.H.I (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 5. Atun Wardatun, M.Ag., Ph.D (UIN Mataram)
Dewan Penyunting	: 1. Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag 2. Tuti Harawati, M.Ag 3. Dr. Muhammad Saleh, M.Ag 4. Hj. Siti Nurul Khairani, M.M 5. Husna Ainu Syukri, M.T
Lay-outer	: Yuga Anggana Sosani, M.Sn
Tata Usaha	: Herman Sah, S.Sos Eva Yanuarta, S.E

Alamat

Qawwam Journal for Gender Mainstreaming

Pusat Studi Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Islam Negeri Mataram

Jl. Gadjah Mada No. 100 Jempong Mataram NTB 83125

Telp. (0370) 621298, 63449 Fax. 625337

Email:journalqawwam@gmail.com

E-ISSN: 2540-9182

P-ISSN: 2086-3357

QAWWAM

Journal for Gender mainstreaming

DAFTAR ISI

TRANSLITERASI ~ iv

POTRET KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER DI
PEMERINTAH PROVINSI NTB

Kadri ~ 1

STUNTING PADA ANAK: PENYEBAB DAN FAKTOR RISIKO STUNTING DI
INDONESIA

Nur Oktia Nirmalasari ~ 19

MENJAWAB PROBLEMATIKA YANG DIHADAPI ANAK USIA DINI DI MASA
PANDEMI COVID-19: PROBLEMATIKA DAN SOLUSI

Farida Rohayani ~ 29

KESETARAAN GENDER BERBASIS PISUKE DI DESA PADAMARA DALAM
BIDANG PENDIDIKAN: SUDUT PANDANG TEORI PERTENTANGAN KELAS
KARL MARX

Erwin Fadli ~ 51

PENGUATAN PERAN PEREMPUAN SEBAGAI “CADIK PANDAI” DAN “BUNDO
KANDUANG” DALAM PEMBERDAYAAN KEGIATAN DIDIKAN SUBUH

Irwandi ~ 64

PETUNJUK PENULISAN

TRANSLITERASI

ا : a	غ : gh
ب : b	ف : f
ت : t	ق : q
ث : ts	ك : k
ج : j	ل : l
ح : h	م : m
خ : kh	ن : n
د : d	و : w
ذ : dz	ه : h
ر : r	ء : '
ز : z	ي : y
س : s	Untuk mad dan diftong
ش : sy	ا : â
ص : sh	ي : û
ض : dh	و : û
ط : th	أو : au
ظ : zh	أي : ai
ع : '	

POTRET KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER DI PEMERINTAH PROVINSI NTB:

Perspektif Komunikasi Organisasi

Kadri

Universitas Islam Negeri Mataram

suhadah.kadri@gmail.com

Abstrak: Dengan menggunakan perspektif komunikasi organisasi, riset ini fokus mengungkap kebijakan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi Anggaran Responsif Gender dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil riset kualitatif ini menunjukkan bahwa meskipun Pemprov NTB memiliki political will terhadap anggaran yang responsif gender dan pemberdayaan perempuan lewat regulasi dan misi pembangunan yang ditetapkannya, namun dalam perencanaan dan implementasi anggaran belum secara maksimal mengakomodir semangat responsif gender dan pemberdayaan perempuan. Komunikasi organisasi Pemerintah Provinsi NTB lebih banyak berlangsung secara internal, sementara komunikasi eksternal dengan *stakeholders* yang memiliki kompetensi di bidang pemberdayaan perempuan terlihat minim sehingga masih ada persoalan-persoalan perempuan di NTB yang luput dari perhatian pemerintah provinsi.

[Abstract: By using an organizational communication perspective, this research focuses on uncovering the policies, planning, implementation and evaluation of the Gender Responsive Budget and women's empowerment in Nusa Tenggara Barat (NTB) Province. The results of this qualitative research show that although the NTB Provincial Government has the political will of a gender responsive budget and women's empowerment by setting relevant regulations and missions, but in planning and implementing the budget it has not optimally accommodated the spirit of gender responsive and women's empowerment. Organizational communication of the NTB Provincial Government is more internal, while external communication with stakeholders who have competence in the field of women's empowerment seems minimal so there are still women's problems in NTB that have escaped the attention of the provincial government.

Kata Kunci: Anggaran responsive gender, provinsi NTB, pemberdayaan perempuan, kebijakan, komunikasi organisasi

A. PENDAHULUAN

Isu tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan atau optimalisasi manfaat pembangunan di suatu wilayah terhadap komunitas perempuan telah menjadi komitmen dari pihak eksekutif. Paling tidak komitmen tersebut secara administratif terlihat dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan diikuti oleh eksekutif yang ada di daerah. Di level nasional misalnya, pemerintah telah mengeluarkan Inpres No.

9 tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Untuk petunjuk operasional dalam pengimplementasiannya, maka Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah sebagai dasar pelaksanaan Anggaran Responsif Gender (ARG). Kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan semangat yang sama untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 39 tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Daerah Nusa Tenggara Barat.

Kebijakan secara administratif seperti Inpres, Keputusan Menteri, dan Pergub memang merupakan bentuk komitmen sekaligus menjadi dasar untuk menyusun dan mengeksekusi program untuk pemberdayaan perempuan. Akan tetapi regulasi tersebut tidak akan memiliki daya pengaruh yang signifikan bila tidak diikuti dengan keberpihakan anggaran. Beberapa studi terkait menemukan ketidaksesuaian antara komitmen yang ada di regulasi dengan kebijakan di level penganggaran. Riset klasik dari Sopanah¹ (2004) misalnya, menemukan masih adanya kesenjangan antara kebijakan yang berpihak pada keadilan gender dengan cara pemerintah melakukan pengalokasian serta penggunaan anggaran, terutama bila dilihat dari anggaran untuk kepentingan perempuan yang masih kurang dari 5% dari total anggaran. Di level daerah juga mengalami hal yang sama. Riset Astuti² di Kota Semarang misalnya menemukan adanya besaran alokasi anggaran yang belum mencerminkan transformasi komitmen gender ke dalam komitmen anggaran. Hal ini ditujukan dengan menurunnya alokasi anggaran untuk program-program yang sesungguhnya sangat penting untuk merealisasikan kesetaraan.

Ketidakmaksimalan implementasi anggaran responsive gender di pusat dan daerah disebabkan oleh beberapa kendala, seperti masih adanya pandangan bahwa masalah gender merupakan tanggungjawab satu sektor pemerintahan, proses penganggaran yang belum berperspektif gender, kecilnya pagu indikatif yang diajukan oleh pemerintah, dan minimnya keterwakilan

¹Sopanah, "Menyoal Anggaran Publik, dalam Pesangon Gate", *Bulletin Suara Korban*, Malang Corruption Watch (MCW), Edisi 1 Maret 2004.

²Puji Astuti, "Analisis Anggaran Responsif Gender pada APBD Kota Semarang Tahun 2010-2013", *Politika*, Vol. 7, No. 1, April 2016

perempuan dalam posisi strategis dalam penyusunan APBN.³ Problem-problem yang dihadapi dalam kebijakan ARG seperti diungkap Farida di atas menunjukkan bahwa persoalan keberpihakan anggaran bagi perempuan berawal dari hulu hingga hilir, atau mulai dari representasi perempuan di tingkat pengambil kebijakan hingga strategi implementasi di lapangan. Bila beberapa riset tersebut di atas menemukan tidak maksimalnya implementasi ARG di level daerah dengan berbagai penyebabnya, lalu bagaimana dengan Pemprov NTB yang telah memiliki regulasi terkait dan yang secara tegas mencantumkan kesetaraan gender dalam salah satu misi pembangunannya? Jawaban atas pertanyaan tersebut terungkap dalam riset ini.

Riset ini tidak hanya mengungkap porsi anggaran yang tersedia bagi pemberdayaan perempuan di Pemprov NTB tetapi juga mengeksplorasi strategi implementasi kebijakan Pemprov NTB terhadap program-program yang terkait dengan pemberdayaan perempuan. Aktivitas yang dilakukan oleh Pemprov NTB seperti tersebut merupakan bentuk komunikasi organisasi atau yang oleh Pace dan Faules disebut sebagai “perilaku pengorganisasian”⁴. Dalam makna yang lebih operasional Zelko dan Dance⁵ mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai suatu sistem yang saling tergantung yang mencakup komunikasi internal dan komunikasi eksternal, dan juga komunikasi pembangunan, yang meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan.⁶ Oleh karena itu, bila komunikasi organisasi dijadikan alat untuk meneropong kebijakan dan implementasi ARG di suatu daerah maka tidak cukup dengan melihat dinamika internal saat penyusunan anggaran tetapi juga perlu mencermati pola komunikasi mereka (pemerintah daerah) dengan masyarakat saat mengimplementasikan anggarannya.

Beberapa riset tentang ARG yang menggunakan perspektif komunikasi telah memberi sumbangsih akademik bagi suksesnya agenda pengarusutamaan

³lihat Syarifah Ida Farida, “Anggaran Responsif Gender sebagai suatu Instrumen Negara untuk Pemenuhan Hak Perempuan di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma*, Vol.1, No.2, Februari 2018

⁴R. Wayne Pace & Don F. Faules, *Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, (Bandung: Rosda, 2015), 33.

⁵lihat Arni Muhammad. *Komunikasi Organisasi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 66

⁶Nasution, Zulkarnaen. *Komunikasi Pembangunan; Pengenalan Teori dan Penerapannya*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 106.

gender dalam pembangunan. Lestari dan Dewi⁷ misalnya menemukan model komunikasi PUG-ARG yang terbukti mampu memperlancar proses komunikasi pembuatan program kerja yang responsive gender dan diimplementasikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, serta didukung oleh personil di semua dinas yang memiliki pengetahuan memadai tentang PUG. Studi ini tidak menemukan dan menguji model komunikasi sebagaimana yang dilakukan oleh Lestari dan Dewi, tetapi mengungkap kebijakan dan strategi implementasi ARG dan program pemberdayaan perempuan yang dilakukan Pemprov NTB sebagai bagian dari komunikasi organisasi.

Untuk mengungkap hal tersebut, riset ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat diskriptif dengan tujuan memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai pelaksanaan penganggaran yang berdimensi gender pada APBD Pemprov NTB tahun 2019. Penelitian ini berangkat dari data sekunder yang tersedia dari APBD, dengan mengkaji pengeluaran pada Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), yang berdampak pada kesetaraan gender, terutama pada tiga dinas yang menjadi sampel yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Sementara data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara mengenai informasi penerapan serta kendala-kendala ARG.

Di samping mengkaji keberpihakan anggaran (APBD) provinsi NTB terhadap program-program yang terkait dengan ARG dan pemberdayaan perempuan, penelitian ini juga mengkaji aspek-aspek kualitatif lainnya baik dalam konteks implementasi anggaran pada tiga dinas yang menjadi sampel penelitian. Sampel diambil dengan teknik *purposive sampling*. Tiga dinas tersebut dianggap sebagai dinas yang memiliki program yang terkait dengan pemberdayaan perempuan atau banyak melibatkan perempuan dalam programnya. Data dikumpulkan lewat dokumentasi dan wawancara mendalam dengan unsur pimpinan yang ada di tiga dinas dan pihak-pihak lain yang dianggap memiliki pemahaman terkait dengan fokus penelitian seperti pegiat LSM, aktivis perempuan, dan peneliti tentang gender.

Data dianalisis dengan teknik analisa data kualitatif, yang dilakukan dengan prosedur mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu

⁷Puji Lestari & Machya Astuti Dewi, "Model Komunikasi dalam Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 8, Nomor 2, Mei - Agustus 2010, halaman 191 - 203

yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain lewat laporan hasil kajian. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti melakukan tiga hal yakni; (a) memperpanjang waktu penelitian; (b) secara tekun melakukan pengamatan; (c) melakukan triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara dengan pengamatan; (d) melakukan *member check*, terutama untuk mengkonfirmasi kembali hasil penelitian kepada informan; dan (e) pemeriksaan sejawat melalui diskusi.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dan Perencanaan ARG dan Pemberdayaan Perempuan

Komitmen suatu pemerintahan terhadap pemberdayaan perempuan dan kesetaraannya gender tidak hanya dilihat dari keberpihakan anggarannya tetapi juga dari kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan yang memiliki hubungan dengan anggaran yang harus mereka alokasikan. Di samping terkait dengan aspek perencanaan seperti tersebut, komitmen juga dapat dilihat dalam level implementasi terutama untuk menelusuri keseriusan pemerintah dalam mengeksekusi program. Sementara aspek ketiga yang ditelusuri guna mengetahui komitmen penyelenggara pemerintahan dalam pemberdayaan perempuan adalah aspek evaluasi. Pada bagian ini diungkap bentuk komitmen Pemprov NTB dalam pemberdayaan perempuan dan Anggaran Responsif Gender, dengan menjadikan indikator kebijakan dan perencanaan, implementasi program, dan evaluasi sebagai alat konfirmasinya.

Dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan, Pemprov NTB dinilai memiliki komitmen yang tinggi terhadap penerapan ARG. Penilaian ini didasarkan pada dua hal yang dimiliki Pemprov NTB yakni; *pertama*, adanya Peraturan Gubernur No. 39 tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Daerah Nusa Tenggara Barat; dan *kedua*, dalam salah satu misi Pemprov NTB yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019 – 2023 secara eksplisit disebutkan “mempercepat perwujudan masyarakat madani yang beriman dan berakhlak dengan prinsip dasar menghargai kemanusiaan, keberagaman, dan kesetaraan gender yang proporsional. Pernyataan yang lebih eksplisit lagi tertuang dalam salah satu tujuan dari misi tersebut yakni “mewujudkan kesetaraan gender yang proporsional dalam pembangunan politik dan ekonomi”, dengan sasaran pembangunannya yaitu “meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, politik, dan ekonomi”.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov NTB yang terkait dengan ARG dan pemberdayaan perempuan di atas dapat dimaknai sebagai bentuk kepatuhan pemerintah daerah terhadap kebijakan pemerintah yang ada di atasnya, dan hal ini menurut Ripley dan Franklin⁸ dikategorikan sebagai salah satu kriteria untuk mengukur keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Artinya Peraturan Gubernur No. 39 tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Daerah Nusa Tenggara Barat telah berkontribusi bagi keberhasilan implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah.

Kebijakan Pemprov NTB dengan Pergub Nomor 39 Tahun 2014 dan penetapan misi yang terkait dengan kesetaraan gender ditindaklanjuti dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diketuai oleh Kepala Bappeda dan Dinas P3AP2KB sebagai sekretarisnya. Sedangkan di masing-masing OPD telah dibentuk focal point untuk mengawal implementasi ARG di lingkup kerja masing-masing. Keberadaan focal point PUG dianggap strategis karena merekalah yang ada di garda terdepan dalam memastikan apakah program yang disusun dan dijalankan sudah mempertimbangkan kesetaraan gender atau belum. Namun peran Ketua dan Sekretaris Pokja PUG juga tidak kalah pentingnya ketua (Kepala Bappeda) lah yang bertugas menyusun dan mengevaluasi program kerja dari masing-masing OPD, sehingga mereka menjadikan ARG sebagai alat konfirmasi terhadap setiap program yang direncanakan. Demikian juga peran DP3AP2KB sebagai sekretaris dapat memaksimalkan peran koordinasinya sehingga semua OPD bisa memiliki frekuensi yang sama dalam mengimplementasikan ARG.

Dari kebijakan yang dikeluarkan dan tindakan yang diambil oleh Pemprov NTB seperti yang dijelaskan di atas maka tidak salah bila dikatakan bahwa di level *political will*, Pemprov NTB telah *on the right track* karena menempatkan aspek kesetaraan gender sebagai semangat dalam menjalankan setiap agenda program di lingkup provinsi NTB. Namun *best practices* di level kebijakan tersebut tidak sejalan dengan implementasi perencanaan dan implementasi program di setiap OPD karena mereka belum sepenuhnya mentransformasi semangat kebijakan PUG ke dalam penyusunan anggaran yang responsive gender. Sebagai contoh, ketika penulis mengikuti proses penyusunan program di Bappeda NTB, tidak pernah mendengar tim

⁸Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, (Chicago-Illionis: the Dorsey Press, 1986), 12.

perencana dari Bappeda mengkonfirmasi setiap usulan program yang berasal dari masing-masing OPD dengan ARG atau PUG. Hal ini mengindikasikan bahwa eksistensi Pokja PUG tidak memberi kontribusi bagi terwujudnya ARG di lingkup Pemprov NTB.

Bappeda sebagai institusi yang menjadi “jenderal” dalam mengawal ARG sejatinya memiliki peran penting karena semua usulan program dari setiap OPD dieksekusi di kantor tersebut (Bappeda). Dalam tradisi penyusunan program di Pemprov NTB pada umumnya dimulai dari penyusunan program oleh masing-masing bagian yang ada di OPD kemudian diusulkan ke sekretaris OPD. Selanjutnya sekretaris OPD melalui kasubag program menginventarisir dan meneruskannya ke Bappeda untuk dibahas sebelum diusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Riset ini menemukan bahwa Kepala Bappeda belum sepenuhnya menggunakan posisinya sebagai Ketua Pokja PUG untuk mendorong ARG dalam setiap program Pemprov NTB. Atas kenyataan ini maka bila kembali menggunakan indikator dari Ripley dan Franklin⁹ dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan maka dapat dikatakan bahwa implementasi Pergub Nomor 39 Tahun 2014 dinilai gagal karena tidak dipatuhi oleh unsur pimpinan yang ada di bawahnya atau aparat yang menjadi bawahan Gubernur yang telah mengeluarkan peraturannya.

Dalam hal perencanaan program pemberdayaan perempuan, pada dasarnya Pemprov NTB telah melakukan perencanaan sesuai dengan mekanisme yang ada di pemerintah daerah. Hal ini terlihat pada tradisi perencanaan yang dilakukan oleh DP3AP2KB sebagai OPD yang secara eksplisit memiliki salah satu tugas untuk pemberdayaan perempuan. Namun satu hal yang belum dilakukan oleh DP3AP2KB yakni belum secara maksimal melibatkan stakeholder, khususnya aktivis dan lembaga non pemerintah yang memiliki kompetensi di bidang pemberdayaan perempuan. Padahal ide dan masukan dari para pegiat pemberdayaan perempuan sangat dibutuhkan agar jenis program pemberdayaan perempuan yang diusulkan oleh DP3AP2KB benar-benar sesuai dengan persoalan dan kebutuhan perempuan di NTB. Menghadirkan stakeholders secara terbatas oleh masing-masing OPD merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan masukan yang bagus bagi perencanaan program. Cara seperti inilah yang lebih tepat disebut perencanaan

⁹Ripley, Randal B. and Grace A. Franklin, *Policy Implementation...*, 12.

partisipatif¹⁰, bukan sekedar melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) yang lebih terkesan formalistik.

Eksistensi stakeholders yang paham dan berpengalaman dalam pemberdayaan perempuan sangat penting dijadikan mitra oleh OPD yang memiliki tugas pemberdayaan perempuan seperti DP3AP2KB. OPD ini dapat mengeksplorasi data atau update terbaru tentang persoalan perempuan di daerah dari stakeholders tersebut sebagai *second opinion* dalam menyusun perencanaan program pemberdayaan perempuan. Kerjasama antara pemerintah dengan actor non pemerintah seperti ini menurut Sururi¹¹ merupakan salah satu pendekatan dalam upaya mewujudkan *good public policy governance*.

Dalam pendekatan makro komunikasi organisasi, setiap organisasi (seperti pemerintah daerah) dipandang sebagai suatu struktur global yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam konteks inilah eksistensi stakeholders pemerintah daerah tidak bisa diabaikan sebagai mitra dalam proses perencanaan hingga evaluasi program. Muhammad¹² menyebut bahwa dalam interaksinya dengan lingkungan, organisasi setidaknya melakukan empat aktivitas komunikasi yakni memproses informasi dari lingkungan, mengadakan identifikasi, melakukan integrasi, dan menentukan tujuan organisasi. Bila merujuk pada relasi organisasi dengan lingkungannya dalam tataran makro seperti di atas maka sangat beralasan bila pemerintah daerah atau OPD yang bertugas dalam pemberdayaan perempuan melibatkan akademisi, aktivis perempuan dan stakeholder terkait lainnya dalam proses penyusunan kebijakan (program) agar tujuan organisasinya (pemberdayaan perempuan) dapat diwujudkan.

Implementasi dan Evaluasi ARG dan Pemberdayaan Perempuan

Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Daerah Nusa Tenggara Barat merupakan pintu masuk yang legal untuk mengimplementasikan ARG di tingkat provinsi NTB karena Pergub ini juga secara eksplisit mendelegasikan tugas PUG dan ARG kepada masing-masing OPD. Apalagi Pemprov NTB juga telah membentuk

¹⁰Abe memaknai perencanaan partisipatif sebagai perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan masyarakat (baik secara langsung maupun tidak langsung). Selengkapnya lihat Alexander Abe, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, (Solo: Pondok Edukasi, 2002), 81

¹¹Ahmad Sururi, 2017, "Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance", *Spirit Publik*, Volume 12, Nomor 2, Oktober 2017, hal. 14-31

¹²Lihat Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 75

Pokja PUG dan Focal Point untuk mengawal implementasi ARG dan PUG di setiap OPD. Dalam Pergub tersebut secara eksplisit disebutkan tugas dari focal point PUG yakni (a) mempromosikan pengarusutamaan gender pada masing-masing unit kerja; dan (b) memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender.

Meskipun secara komitmen PUG dan ARG telah dimiliki oleh provinsi NTB namun dalam implementasinya, Pokja dan Focal Point belum maksimal untuk mengintegrasikan ARG dalam APBD. Kenyataan ini berimplikasi pada belum maksimalnya implementasi ARG dalam setiap OPD. Hal tersebut tergambar dari implementasi program yang ada pada DP3AP2KB, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Ketidakmaksimalan implementasi ARG pada tiga OPD tersebut terlihat ketika menggunakan analisis ARG dari Budlender dkk¹³ yang terdiri dari tiga kategori ARG, sebagaimana terlihat dalam tabel 1.

Tabel 1
Tiga Kategori Anggaran Responsif Gender

NO	KATEGORI ARG	PENJELASAN
1	Spesifik Gender	Anggaran utk kebutuhan spesifik gender tertentu
2	Kesetaraan Gender/ Gender Affirmative	Anggaran untuk kesetaraan dalam pekerjaan. Atau anggaran yang afirmatif untuk wujudkan kesempatan yang setara
3	Gender Mainstream	Alokasi anggaran untuk kepentingan umum, yang dirasakan oleh laki-laki maupun perempuan

Bila program tahun 2019 yang ada pada tiga OPD (DP3AP2KB, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan) dianalisis dengan menggunakan tiga kategori ARG seperti di atas maka hasilnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini (Tabel 2, 3, dan 4).

Tabel 2
Analisis ARG pada Program DP3AP2KB Tahun 2019

No	Program	Kategori ARG
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Kategori 3
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kategori 3
3	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Kategori 3
4	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori 3

¹³Debbie Budlender, et.all. *Gender Budgets Make Cents: Understanding Gender Responsive Budgets*. (London: Commonwealth Secretariat, 2002), 53-54.

5	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Kategori 3
6	Program Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Kategori 1
7	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Kategori 1
8	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak	Kategori 1
9	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Kategori 1
10	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	Kategori 2
11	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Kategori 2
12	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRL	Kategori 2
13	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Kategori 2

Sumber: Diolah dari DPA DP3AP2KB Tahun 2019

Dari tabel 2 diketahui bahwa dari 13 belas program pada DP3AP2KB tahun 2019 terdapat empat program yang masuk dalam kategori ARG 1 (spesifik gender), empat program lainnya masuk dalam kategori ARG 2 (kesetaraan gender), dan lima program sisanya teridentifikasi sebagai ARG kategori 3 (gender mainstream). Anggaran untuk program dari DP3AP2KB tahun 2019 berimbang antara program yang spesifik untuk perempuan dengan yang setara antara perempuan dan laki. Berbeda dengan Dinas Sosial yang semua program kerjanya di tahun 2019 termasuk dalam kategori 3, yakni program yang bersifat umum (tidak khusus untuk jenis kelamin tertentu). Hal ini terlihat secara eksplisit dalam Tabel 3.

Tabel 3
Analisis ARG pada Program Dinas Sosial, Tahun 2019

No	Program	Kategori ARG
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Kategori 3
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kategori 3
3	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Kategori 3
4	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori 3
5	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan	Kategori 3

	daerah	
6	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Kategori 3
7	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Kategori 3
8	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Kategori 3
9	Program jaminan sosial	Kategori 3

Sumber: Diolah dari DPA Dinas Sosial Tahun 2019

Informasi dari Tabel 3 menunjukkan bahwa Dinas Sosial Pemprov NTB tidak memiliki program yang khusus untuk perempuan atau untuk laki-laki. Semua program dinas tersebut melibatkan atau diperuntuk secara bersama antara perempuan dan laki-laki. Komposisi anggaran Dinas Sosial pada tahun 2019 pada dasarnya tidak berbeda dengan anggaran pada Dinas Kesehatan karena hampir semua (16 dari 17 program) program kerja mereka (Dinas Kesehatan) di tahun 2019 termasuk dalam kategori ARG 3, yakni anggaran yang dialokasi untuk program bersama antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan satu-satunya program yang masuk dalam kategori 1 adalah “Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak”. Selengkapnya lihat Tabel 4.

Tabel 4
Kategori ARG pada Program Dinas Kesehatan, Tahun 2019

No	Program	Kategori ARG
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Kategori 3
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kategori 3
3	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Kategori 3
4	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori 3
5	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Kategori 3
6	Program obat dan perbekalan kesehatan	Kategori 3
7	Program upaya kesehatan masyarakat	Kategori 3
8	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Kategori 3
9	Program perbaikan gizi masyarakat	Kategori 3
10	Program pengembangan lingkungan sehat	Kategori 3
11	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Kategori 3
12	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Kategori 3

13	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Kategori 3
14	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kategori 1
15	Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	Kategori 3
16	Program sumber daya kesehatan	Kategori 3
17	Program penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar	Kategori 3

Sumber: Diolah dari DPA Dinas Kesehatan Tahun 2019

Dari semua klasifikasi ARG pada tiga OPD yang ada di provinsi NTB sebagaimana yang dijelaskan di atas maka dapat dikatakan bahwa Pemprov NTB pada dasarnya telah mengimplementasikan ARG, akan tetapi lebih didominasi oleh kategori ARG 3. Hal ini berarti bahwa program-program yang ada di tiga OPD yang menjadi sampel studi ini tidak banyak yang langsung bersentuhan dengan gender tertentu. Bila gender tertentu tersebut dikaitkan dengan perempuan misalnya, maka dapat dikatakan bahwa tidak ditemukan banyak program yang secara khusus diperuntukkan untuk pemberdayaan perempuan dari tiga OPD (DP3AP2KB, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan).

Perhatian yang tidak maksimal dari Pemprov NTB terhadap ARG tidak hanya dilihat dari kurangnya program yang masuk dalam kategori ARG 1 tetapi juga dari rendahnya alokasi anggaran yang diberikan kepada OPD yang bertugas untuk pemberdayaan perempuan (DP3AP2KB). Berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas P3AP2KB diketahui bahwa anggaran belanjanya dinas tersebut pada tahun 2019 sebesar Rp. 12,138,026,999.00. Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah Anggaran Belanja Dinas P3AP2KB tahun 2019 turun sebesar 3% dibandingkan dengan anggaran belanjanya pada tahun 2018 yang berjumlah Rp. 12,466,673,300.00. Anggaran sebesar Rp. 12,138,026,999.00 yang dikelola oleh DP3AP2KB hanya sebesar 0.23 % dari APBD provinsi tahun 2019 (5,273,582,354,405.00).

Anggaran 0.23 % dari APBD provinsi bagi dinas yang bertugas untuk memberdayakan perempuan sangatlah kecil. Hal ini menunjukkan komitmen yang rendah dari provinsi NTB untuk menjadikan program pemberdayaan perempuan sebagai program yang mendapat prioritas. Apalagi anggaran sejumlah Rp. 12,138,026,999.00 tersebut tidak semuanya dialokasikan untuk program yang langsung menyentuh pada level pemberdayaan perempuan atau belanja langsung. Jumlah anggaran belanja langsung (belanja public) DP3AP2KB Provinsi NTB tahun 2019 sebesar 57% dari jumlah Belanja keseluruhan (lihat Tabel 5). Keberpihakan yang tidak maksimal terhadap anggaran pemberdayaan perempuan juga menunjukkan rendahnya political will

pemerintah dalam merencanakan anggaran bagi pemberdayaan perempuan sehingga berakibat bagi kurangnya program yang solutif terhadap persoalan perempuan di daerah. Korelasi antara komitmen penganggaran dengan bentuk program seperti ini cukup berlasan karena anggaran menurut Mardiasmo merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi¹⁴.

Tabel 5
Perbandingan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Tahun 2019 pada DP3AP2KB Provinsi NTB

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran	Persentase
1	Belanja Tidak Langsung	5,229,706,800.00	43%
2	Belanja Langsung	6,908,320,199.00	57%
	Jumlah Belanja	12,138,026,999	100%

Sumber: Diolah dari DPA DP3AP2KB Tahun 2019

Tidak semua program yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB provinsi NTB terkait dengan pemberdayaan perempuan karena di dinas tersebut masih terdapat banyak program yang lain seperti program yang terkait dengan anak dan beberapa program yang bersifat administrative. Pada tahun 2019 hanya tujuh program yang langsung berkaitan dengan pemberdayaan perempuan (lihat Tabel 6).

Tabel 6
Daftar Program Pemeberdayaan Perempuan di DP3AP2KB Tahun 2019

No	Nama Program
1	Program Kesenjangan Kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
3	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak
4	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
5	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
6	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
7	Program Kebijakan dan Manajemen Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Sumber: Diolah dari DPA DP3AP2KB Tahun 2019

Dari tujuh program yang terkait dengan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB memang semuanya masih berhubungan dengan persoalan yang dihadapi oleh perempuan di NTB. Namun sangat

¹⁴Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta: ANDI, 2009).

bagus bila permasalahan-permasalahan yang serius seperti “pernikahan pertama di usia muda” mendapat perhatian yang lebih dalam program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh DP3AP2KB. Sebagaimana diketahui bahwa rata-rata usia kawin pertama di NTB sebesar 20,21 tahun.¹⁵ Meskipun usia rata-rata ini di atas standar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (batas usia perkawinan minimal 19 tahun), namun bila merujuk pada standar ideal usia perkawinan dari BKKBN maka rata-rata usia kawin pertama bagi perempuan di NTB masih di bawah standar, karena menurut BKKBN, usia kawin pertama bagi perempuan yakni minimal 21 sampai 25. Semakin dewasa usia perkawinan akan semakin baik karena usia kawin yang rendah akan mempengaruhi kualitas hidup generasi sehingga rawan dengan gizi kurang, stunting, kematian ibu melahirkan, kematian bayi, dan lain-lain.

Menyelesaikan persoalan pernikahan pertama di usia muda membutuhkan anggaran yang serius dan pengelolaan program yang lebih kreatif dengan melibatkan stakeholders terkait. Apalagi persoalan pernikahan dini ini telah menjadi budaya sehingga butuh cara ekstra yang terkadang berbeda dengan tradisi pelaksanaan program dalam birokrasi. Sebagai contoh, di pulau Lombok pernikahan dini menjadi bagian dari kultur masyarakat. Tradisi *merariq* (dengan membawa lari gadis yang akan dinikahi) telah mengaburkan batas ideal bagi seorang wanita dalam melakukan pernikahan. Tradisi ini menurut Windia¹⁶ telah menyumbang kasus maraknya pernikahan dini di tengah masyarakat Sasak. Dalam konteks inilah pentingnya Pemprov NTB menggandeng stakeholders seperti budayawan dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menformulasi program dan pendekatan yang tepat untuk mengatasi persoalan perempuan. Mensinkronkan pendekatan budaya dengan kebijakan pembangunan adalah langkah yang tepat, sehingga perempuan tidak seperti yang disebut (disindir) oleh Fakih¹⁷ sebagai komunitas yang mengalami “penindasan berlapis” mulai dari diskriminasi di level budaya hingga kebijakan pembangunan.

Jalanan komunikasi antara pemerintah daerah umumnya dan OPD sebagai pelaksana program khususnya dengan masyarakat (stakeholders) sejatinya harus terus dilakukan antara lain dengan melibatkan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Faktor komunikasi dalam

¹⁵Data ini diperoleh dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan Gubernur NTB di hadapan Sidang Paripurna DPRD NTB

¹⁶Lalu Bayu Windia, *Manusia Sasak*, (Yogyakarta: Genta Pres, 2007), 35

¹⁷Baca Mansour Fakih, “Menuju Dunia yang Lebih Adil melalui Perspektif Gender: Sebuah Pengantar” dalam Julia Cleves Mosse, *Gender & Pembangunan*, penerjemah: Hartian Silawati, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), ix.

implementasi kebijakan menjadi salah satu factor penentu keberhasilan.¹⁸ Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang tidak melibatkan public adalah kebijakan yang bersifat *top down*, yang oleh Faludi diklaim kurang realistis karena minimnya informasi yang diperoleh dari lapangan.¹⁹ Dalam konteks hasil, perencanaan yang bersifat *top down* juga cenderung menghasilkan tingkat pemberdayaan yang paling kecil.²⁰

Idealnya keterlibatan stakeholders dalam program pemberdayaan perempuan harus totalitas agar memiliki efek penyelesaian masalah. Mereka akan lebih maksimal dan kontinyu bila diikuti sejak penyusunan program hingga pelaksanaan evaluasi kegiatan. Riset ini tidak menemukan pelibatan akademisi dan aktivis perempuan dan stakeholders lainnya secara totalitas dalam melakukan evaluasi terhadap program yang terkait dengan pemberdayaan perempuan di DP3AP2KB. Evaluasi program pada DP3AP2KB lebih bersifat internal, baik dilakukan oleh masing-masing pelaksana program maupun oleh Dinas secara keseluruhan. Evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing pelaksana program biasanya dilakukan pada saat program berlangsung (*progress*) dan setelah program berakhir (evaluasi akhir program). Evaluasi biasanya berlangsung tiap semester, di samping evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda NTB bersamaan dengan OPD lainnya²¹.

Karena proses perencanaan tidak memaksimalkan peran Pokja PUG dan focal point yang ada di setiap OPD maka hal yang sama juga terlihat dalam proses evaluasi. Tidak ditemukan proses evaluasi program ARG setelah program berakhir baik di Bappeda maupun di tiga OPD yang menjadi sampel riset ini. Dalam setiap program yang dilaksanakan juga tidak dilakukan evaluasi proses dari peserta yang dilibatkan dalam program atau yang didampingi dan dibina oleh DP3AP2KB provinsi NTB baik di level provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Tidak ditemukan dokumen evaluasi berupa angket atau lembaran dan hasil evaluasi dari peserta pelatihan atau pendampingan dari masing-masing program yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB provinsi NTB. Padahal melibatkan masyarakat atau stakeholders dalam kegiatan evaluasi

¹⁸Menurut Edward, komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Selengkapnya baca George C. Edward III (edited), *Public Policy Implementing*, (London-England: Jai Press Inc., 1984), 9-10.

¹⁹Andreas Faludi, *Planning Theory*. (Oxford: Pergamon Press Ltd, 1973)

²⁰Nick Bailey & Madeleine Pill., "Can the state empower communities through localism? An evaluation of recent approaches to neighbourhood governance in England. In *Environment and Planning C: Government and Policy*, Vol. 33, 2015, hal. 289-304

²¹Wawancara dengan Bapak Untung (Kasi Program BP3AP2KB), Juli 2019

pasca program sangat penting agar konsep partisipasi menjadi luas, yang berawal dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi.²²

Bila pengalaman evaluasi program yang dilakukan oleh DP3AP2KB dikaitkan dengan komunikasi organisasi maka dapat dikatakan bahwa DP3AP2KB telah melakukan komunikasi internal dengan baik saat melakukan evaluasi program. Namun tradisi komunikasi yang baik tersebut tidak terjadi pada komunikasi interpersonal secara eksternal dengan komunitas yang di luar OPD nya (stakeholders). Padahal dengan berkomunikasi interpersonal dengan pihak eksternal akan dapat membantu organisasi dalam memahami realitas di luar organisasi sekaligus bisa membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti dengan pihak eksternal.²³

KESIMPULAN

Kebijakan Pemprov NTB tentang Anggaran Responsif Gender dan pemberdayaan perempuan telah *on the right track*, terutama dilihat dari dikeluarkannya Peraturan Gubernur No. 39 tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Daerah Nusa Tenggara Barat. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Pokja PUG dan Focal Point yang ada di setiap OPD. Pemprov NTB juga memiliki political will terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan karena telah menjanjikan kesetaraan gender dalam salah satu misi pembangunan daerah, dan menargetkan terwujudnya “kesetaraan gender yang proporsional dalam pembangunan politik dan ekonomi” dalam tujuan pembangunannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi belum secara maksimal mencerminkan Anggaran Responsif Gender (ARG) karena lebih didominasi oleh ARG kategori 3 yakni gender mainstream. Tidak banyak anggaran yang secara khusus dialokasi untuk jenis kelamin tertentu seperti perempuan sebagai bentuk afirmatif terhadap banyaknya persoalan yang melilit perempuan di NTB. Pemprov NTB juga dinilai belum maksimal melakukan pemberdayaan perempuan lewat program kerjanya. Hal ini antara lain tercermin dari masih rendahnya alokasi anggaran (hanya 0,23 % dari total APBD NTB) kepada DP3AP2KB sebagai OPD yang salah satu tugasnya melakukan pemberdayaan perempuan.

Proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi program di Pemprov NTB belum secara maksimal melibatkan Pokja PUG dan Focal Point PUG

²²Khairul Muluk. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintah Daerah*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 48

²³Arni Muhammad, *Komunikasi...*, hal. 166.

dalam perencanaannya sehingga tidak pernah dilakukan konfirmasi dan verifikasi program dengan kebijakan PUG. Keterlibatan stakeholders terkait dalam proses perencanaan hingga evaluasi program pemberdayaan perempuan belum maksimal. Hal ini antara lain menyebabkan program pemberdayaan perempuan di DP3AP2KB belum sepenuhnya bisa menjawab persoalan yang dihadapi perempuan di NTB. Pemprov NTB lebih intens melakukan komunikasi organisasi secara internal dari pada komunikasi secara eksternal dengan *stakeholders* yang fokus pada kajian dan pemberdayaan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander, 2002, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Solo: Pondok Edukasi
- Astuti, Puji. 2016, "Analisis Anggaran Responsif Gender pada APBD Kota Semarang Tahun 2010-2013", *Politika*, Vol. 7, No. 1, April 2016
- Bailey, Nick & Madeleine Pill, 2015. "Can the state empower communities through localism? An evaluation of recent approaches to neighbourhood governance in England. In *Environment and Planning C: Government and Policy*, Vol. 33
- Budlender, Debbie et.al. 2002, *Gender Budgets Make Cents: Understanding Gender Responsive Budgets*. London: Commonwealth Secretariat
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DP3AP2KB Tahun 2019, tidak diterbitkan.
- Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Tahun 2019, tidak diterbitkan
- Dinas Sosial Provinsi NTB, 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Tahun 2019, tidak diterbitkan
- Edward III, George C. (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, London-England: Jai Press Inc
- Fakih, Mansour Fakih, 2007, "Menuju Dunia yang Lebih Adil melalui Perspektif Gender: Sebuah Pengantar" dalam Julia Cleves Mosse, *Gender & Pembangunan*, penerjemah: Hartian Silawati, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Faludi, Andreas, 1973, *Planning Theory*. Oxford: Pergamon Press Ltd
- Farida, Syarifah Ida, 2018, "Anggaran Responsif Gender sebagai suatu Instrumen Negara untuk Pemenuhan Hak Perempuan di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma*, Vol.1, No.2, Februari 2018
- Lestari, Puji & Machya Astuti Dewi, "Model Komunikasi dalam Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 8, Nomor 2, Mei - Agustus 2010, halaman 191 - 203
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI

- Muhammad, Arni, 2005. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Muluk, Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintah Daerah*, Malang: Bayumedia Publishing
- Pace, R. Wayne & Don F. Faules, 2015, *Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, Bandung: Rosda
- Pemerintah Provinsi NTB, 2019, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2019, tidak diterbitkan.
- Rendal, B. Ripley & Grace A. Franklin. 1986, *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, Chicago-Illionis: the Dorsey Press
- Sopannah, 2004, Menyoal Anggaran Publik, dalam Pesangon Gate, *Bulletin Suara Korban*, Malang Corruption Watch (MCW), Edisi 1 Maret 2004.
- Sururi, Ahmad, 2017, “Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance”, *Spirit Publik*, Volume 12, Nomor 2
- Windia, Lalu Bayu 2007, *Manusia Sasak*, Yogyakarta: Genta Pres
- Zulkarnaen, Nasution. 1996. *Komunikasi Pembangunan; Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

STUNTING PADA ANAK: PENYEBAB DAN FAKTOR RISIKO STUNTING DI INDONESIA

Nur Oktia Nirmalasari

Dokter Relawan BSMI NTB

nur.oktia.nirmalasari@gmail.com

Abstrak: Secara global, *stunting* menjadi salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). Indonesia berproses mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ke-2 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Target yang termasuk di dalamnya adalah penanggulangan masalah *stunting* yang diupayakan menurun pada tahun 2025. *Stunting* patut mendapat perhatian lebih karena dapat berdampak bagi kehidupan anak sampai tumbuh besar, terutama risiko gangguan perkembangan fisik dan kognitif apabila tidak segera ditangani dengan baik. Tulisan ini dibuat dengan melakukan tinjauan pustaka dari berbagai sumber khususnya dicari menggunakan *search engine* yaitu *google scholar*, dengan mengutamakan sumber dari lima tahun terakhir dan merupakan riset yang dilakukan terhadap populasi di Indonesia. Berdasarkan hasil identifikasi dan telaah beberapa sumber, dapat disimpulkan bahwa berbagai faktor risiko terjadinya *stunting* di Indonesia dapat berasal dari faktor ibu, anak, maupun lingkungan. Faktor ibu dapat meliputi usia ibu saat hamil, lingkaran atas ibu saat hamil, tinggi ibu, pemberian ASI ataupun MPASI, inisiasi menyusui dini dan kualitas makanan. Faktor anak dapat berupa riwayat berat badan lahir rendah (BBLR) ataupun prematur, anak dengan jenis kelamin laki-laki, adanya riwayat penyakit neonatal, riwayat diare yang sering dan berulang, riwayat penyakit menular, dan anak tidak mendapat imunisasi. Lingkungan dengan status sosial ekonomi yang rendah, pendidikan keluarga terutama ibu yang kurang, pendapatan keluarga yang kurang, kebiasaan buang air besar di tempat terbuka seperti sungai atau kebun ataupun jamban yang tidak memadai, air minum yang tidak diolah, dan tingginya pajanan pestisida juga berkontribusi dalam menimbulkan kejadian *stunting*.

Keywords: *stunting*, penyebab, determinan, faktor risiko

A. Pendahuluan

Data prevalensi anak balita pendek (*stunting*) yang dikumpulkan *World Health Organization* (WHO) yang dirilis pada tahun 2019 menyebutkan bahwa wilayah *South-East Asia* masih merupakan wilayah dengan angka prevalensi *stunting* yang tertinggi (31,9%) di dunia setelah Afrika (33,1%). Indonesia termasuk ke dalam negara keenam di wilayah *South-East Asia* setelah Bhutan, Timor Leste, Maldives, Bangladesh, dan India, yaitu sebesar 36,4%.¹

Secara global, *stunting* menjadi salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). Indonesia berproses mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ke-2 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Target yang termasuk di

dalamnya adalah penanggulangan masalah *stunting* yang diupayakan menurun pada tahun 2025. Tujuan ke-2 ini berkaitan erat dengan tujuan ke-3 yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.²

Stunting masih menjadi masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia. Berdasarkan data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, angka *stunting* di Indonesia sebesar 30,8%. Angka ini masih tergolong tinggi dibandingkan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu sebesar 19% di tahun 2024. *Stunting* memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk.^{3,4,5}

Stunting didefinisikan sebagai kondisi status gizi balita yang memiliki panjang atau tinggi badan yang tergolong kurang jika dibandingkan dengan umur. Pengukuran dilakukan menggunakan standar pertumbuhan anak dari WHO, yaitu dengan interpretasi *stunting* jika lebih dari minus dua standar deviasi median. Balita *stunting* dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Umumnya berbagai penyebab ini berlangsung dalam jangka waktu lama (kronik).⁴

Stunting patut mendapat perhatian lebih karena dapat berdampak bagi kehidupan anak sampai tumbuh besar, terutama risiko gangguan perkembangan fisik dan kognitif apabila tidak segera ditangani dengan baik. Dampak *stunting* dalam jangka pendek dapat berupa penurunan kemampuan belajar karena kurangnya perkembangan kognitif. Sementara itu dalam jangka panjang dapat menurunkan kualitas hidup anak saat dewasa karena menurunnya kesempatan mendapat pendidikan, peluang kerja, dan pendapatan yang lebih baik. Selain itu, terdapat pula risiko cenderung menjadi obesitas di kemudian hari, sehingga meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, kanker, dan lain-lain.⁴

Tulisan ini bermaksud memberikan gambaran penyebab dan faktor risiko yang umum ditemukan di Indonesia. Tulisan dibuat dengan melakukan tinjauan pustaka dari berbagai sumber khususnya dicari menggunakan *search engine* yaitu *google scholar*, dengan mengutamakan sumber dari lima tahun terakhir dan merupakan riset yang dilakukan terhadap populasi di Indonesia. Diharapkan tulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terhadap populasi terkait, khususnya anak-anak di Indonesia.

B. Pembahasan

Berdasarkan studi terhadap berbagai latar belakang negara di seluruh dunia oleh World Health Organization (WHO), *stunting* dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Terdapat dua faktor utama, yaitu faktor eksternal dari lingkungan masyarakat ataupun negara, dan faktor internal, meliputi keadaan di dalam lingkungan rumah anak.⁵

Suatu negara dan masyarakat di dalamnya berperan dalam menimbulkan kondisi *stunting* pada anak-anak di negara tersebut. Berbagai keadaan seperti kebudayaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, keadaan ekonomi dan politik, keadaan pertanian dan sistem pangan, serta kondisi air, sanitasi, dan lingkungan berperan sebagai faktor eksternal. Sementara itu faktor internal di dalam rumah anak sendiri perlu diperhatikan perawatan anak yang adekuat, pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) yang optimal, keadaan

ibu, kondisi rumah, kualitas makanan yang rendah, keamanan makanan dan air, dan infeksi.⁵

Stunting disebabkan oleh berbagai faktor yang saling mempengaruhi, bukan hanya karena faktor asupan gizi yang buruk pada ibu hamil atau balita saja. Di Indonesia, telah banyak dilakukan penelitian mengenai faktor risiko *stunting*. Risiko *stunting* dapat dimulai sejak masa konsepsi, yaitu dari faktor ibu. Ibu yang kurang memiliki pengetahuan mengenai kesehatan dan gizi sejak hamil sampai melahirkan berperan besar menimbulkan *stunting* pada anak yang dilahirkannya. Pada saat hamil, layanan ANC-Ante Natal Care (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan), Post Natal Care (pelayanan kesehatan untuk ibu setelah melahirkan), dan pembelajaran dini yang berkualitas juga sangat penting. Hal ini terkait dengan konsumsi suplemen zat besi yang memadai saat hamil, pemberian ASI eksklusif dan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) yang optimal.^{5,6}

Pada tahun 2013 di Indonesia, tingkat kehadiran anak di Posyandu semakin menurun menjadi 64% dari 79% di tahun 2007, sehingga anak belum mendapat akses yang memadai ke layanan imunisasi. Selain itu, sebagian besar masyarakat Indonesia masih kurang mampu untuk mengakses makanan bergizi dan air minum bersih dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal. Ditambah dengan kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.⁵



(World Health Organization, 2020)

Salah satu penelitian dilakukan di Kabupaten Demak yang merupakan bagian dari provinsi Jawa Tengah, Indonesia, menunjukkan bahwa salah satu faktor risiko stunting di wilayah ini adalah asupan makanan anak. Padahal, Jawa Tengah adalah

salah satu daerah stok beras nasional di Indonesia yang menempati peringkat keenam dalam produktivitas beras pada tahun 2013. Namun menempati peringkat ketujuh dalam hal kekurangan gizi anak kronis. Penelitian dilakukan pada tahun 2015 dengan meneliti tiga kecamatan di Demak dengan produksi beras tertinggi dan status gizi balita terburuk.⁷

Anak-anak yang dipilih adalah yang berusia 6 hingga 60 bulan dan mendapat ASI serta berasal dari keluarga petani. Anak-anak ini kemudian diambil data mengenai asupan makanannya dan diukur status gizinya. Hampir sepertiga (31,9%) dari 335 anak dalam penelitian ini mengalami *stunting*. Hebatnya, aksesibilitas makanan serupa diantara semua anak, baik yang mengalami *stunting* ataupun tidak. Namun, kualitas makanan terkait asupan energi, kalsium dan zat besi secara signifikan lebih baik pada rumah tangga dengan anak yang tidak mengalami *stunting*. Kebiasaan memakan camilan yang tidak sehat juga ditemukan berkontribusi terhadap asupan makanan yang tidak memadai.⁷

Penelitian lain di Indonesia pada tahun 2017 mengambil data dari hasil RISKESDAS 2010 dengan menganalisis hubungan antara berat lahir rendah (BBLR), praktik pemberian makan anak dan penyakit neonatal dengan *stunting* pada balita Indonesia. Sebanyak 3024 anak-anak berusia 12-23 bulan diambil sebagai sampel. Analisis data dilakukan melalui regresi logistik bivariat dan multivariat.⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* pada balita Indonesia (12-23 bulan) adalah 40,4%. Inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif didapatkan pada 42,7% dan 19,7% bayi. Pemberian MPASI dini ditemukan pada 68,5% bayi. Analisis multivariat menunjukkan bayi yang lahir dengan BBLR sebanyak 1,74 kali lebih mungkin mengalami *stunting* daripada bayi yang lahir dengan berat badan normal. Anak laki-laki 1,27 kali lebih mungkin mengalami *stunting* daripada anak perempuan. Bayi dengan riwayat penyakit neonatal, sebesar 1,23 kali lebih rentan terhadap *stunting*. Kemiskinan adalah variabel tidak langsung lain yang secara signifikan terkait dengan *stunting*.⁸

Penelitian ini menunjukkan bahwa BBLR, jenis kelamin (anak laki-laki), riwayat penyakit neonatal dan kemiskinan adalah faktor yang terkait dengan *stunting* di antara anak-anak yang berusia 12-23 bulan di Indonesia, dengan BBLR menjadi penentu utama *stunting*.⁸

Penelitian selanjutnya dilakukan di daerah Jawa Tengah yaitu di Kecamatan Brebes. Penelitian dilakukan dengan metode *case control* dengan sampel sebanyak 77 anak *stunting* dan 77 anak normal, dengan rentang usia 12-24 bulan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mengenai berat badan lahir, panjang badan lahir, status penyakit, dan pajanan terhadap pestisida.⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor risiko yang berpengaruh terhadap kejadian *stunting* pada anak umur 12-24 bulan di Kecamatan Brebes adalah tingkat kecukupan energi yang rendah, protein yang rendah, seng yang rendah, berat badan lahir rendah, dan tingginya pajanan pestisida. Kelima variabel tersebut memberikan kontribusi terhadap *stunting* sebesar 45%. Faktor risiko yang paling besar terhadap kejadian *stunting* adalah tingginya pajanan pestisida.⁹

Sebuah survei cross-sectional dilakukan pada 2.160 anak perempuan dan laki-laki di Kabupaten Klaten dan Lombok Barat pada tahun 2017. Data yang

dikumpulkan adalah status gizi remaja, karakteristik sosial-demografi, morbiditas, asupan makanan dan aktivitas fisik serta faktor-faktor terkait lainnya.¹⁰

Penelitian ini menunjukkan bahwa sekitar seperempat anak perempuan remaja (25%) dan anak laki-laki (21%) mengalami stunting. Sekitar 5% anak perempuan dan 11% anak laki-laki kurus, sedangkan 11% anak perempuan dan anak laki-laki kelebihan berat badan. Status sosial ekonomi dan pendidikan keluarga yang lebih tinggi ditemukan berkaitan dengan penurunan kemungkinan mengalami stunting.¹⁰

Penelitian lainnya melakukan analisis terhadap pajanan pestisida pada anak dengan stunting, khususnya pada usia sekolah, yaitu 8-12 tahun. Penelitian dilakukan pada tahun 2019 di daerah Bulakamba, Jawa Tengah, yang dikenal dengan daerah pertanian. Penelitian dilakukan dengan metode case control dengan sampel sebanyak 160 anak (48 stunting dan 112 kontrol). Paparan pestisida diukur berdasarkan riwayat paparan sejak periode perinatal, bayi, dan masa kanak-kanak. Variabel lain yang diukur adalah kadar hormon thyroid stimulating hormone (TSH), insulin-like growth factor-1 (IGF-1), hemoglobin, seng, albumin, tingkat kecukupan gizi (energi dan protein), riwayat infeksi, berat lahir rendah (BBLR), dan tinggi ibu.¹¹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat paparan pestisida yang tinggi secara signifikan terkait dengan stunting, dan ditemukan sebagai faktor risiko independen untuk stunting pada anak-anak.¹¹

Pada tahun 2018, dilakukan penelitian di daerah Bantul, Yogyakarta, Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode case-control, dimana 23 anak sebagai kelompok kasus dan 91 anak sebagai kelompok control. Data dikumpulkan dengan mewawancarai para ibu dengan rentang usia anak 6-59 bulan. Diare ditemukan secara signifikan sebagai faktor penentu anak stunting di daerah pedesaan. Hal ini terkait dengan faktor lingkungan yang menjadi salah satu faktor risiko stunting.¹²

Penelitian pada anak sekolah dasar di Provinsi Sumatera Utara, yaitu kota Medan dan Kabupaten Langkat menunjukkan angka prevalensi stunting yang tinggi. Penelitian ini merupakan analisis pendekatan cross-sectional dengan total sampel 400 anak-anak berusia 8-13 tahun pada bulan Juli - Oktober 2017. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan penilaian antropometrik. Prevalensi stunting pada anak-anak sekolah dasar di daerah ini adalah 38,87%. Faktor yang terkait adalah pendidikan ibu, pendapatan, pekerjaan, asupan energi, dan asupan protein. Faktor yang dominan adalah asupan energi.¹³

Hasil penelitian lainnya menunjukkan beberapa faktor risiko yang cenderung sama. Salah satu penelitian dilakukan pada anak balita di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang bertujuan untuk menguji determinan stunting pada balita di daerah ini. Penelitian dilakukan dengan metode analisis observasional dengan desain case control. Penelitian ini dilakukan di 31 posyandu di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dari bulan April hingga Mei 2018. Sampel dari 186 anak dengan variabel dependen stunting dan variabel independen adalah berat lahir rendah (BBLR), panjang lahir, pemberian ASI eksklusif, riwayat penyakit infeksi, usia ibu saat hamil, lingkaran lengan atas ibu saat hamil, dan pendapatan keluarga. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan dianalisis.

Penelitian ini menunjukkan risiko stunting meningkat dengan adanya riwayat BBLR, usia ibu saat hamil <20 atau ≥35 tahun, dan riwayat penyakit menular. Risiko

stunting berkurang dengan pendapatan keluarga yang tinggi, panjang lahir, pemberian ASI eksklusif dan lingkaran lengan atas ibu saat hamil $\geq 23,5$ cm.¹⁴

Salah satu daerah lain di Pulau Lombok, yaitu Kabupaten Lombok Utara juga diketahui memiliki angka stunting yang tinggi terkait dengan perilaku masyarakat, khususnya sanitasi yang buruk. Salah satunya adalah kebiasaan buang air besar di tempat terbuka seperti sungai atau kebun. Faktor lainnya adalah tingkat pengetahuan ibu yang rendah, sehingga seringkali anak yang sakit lebih sering dibawa ke dukun daripada ke tempat pelayanan kesehatan. Salah satu penelitian menganalisis iklan masyarakat yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara yang menyampaikan informasi tentang perilaku sanitasi yang buruk dan kaitannya dengan stunting.¹⁵

Kebiasaan buang air besar di tempat terbuka telah terbukti berhubungan dengan peningkatan kejadian stunting. Hal ini disebabkan karena kotoran manusia dapat menjadi media bagi lalat ataupun serangga lainnya untuk menyebarkan bakteri pada peralatan rumah tangga terutama peralatan makan, sehingga berisiko menyebabkan diare. Diare berulang dan sering pada anak-anak dapat meningkatkan kemungkinan stunting dikarenakan hilangnya nutrisi yang telah dan akan terserap oleh tubuh serta penurunan fungsi dinding usus untuk penyerapan nutrisi. Selain itu, kotoran manusia juga dapat mengkontaminasi lingkungan sekitarnya, sehingga dampaknya tidak hanya terhadap satu orang atau satu keluarga, tetapi juga orang-orang lain di sekitar mereka.^{16,17}

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, dilakukan penelitian di Kabupaten Lombok Barat dengan menganalisis hubungan kehamilan di usia remaja dengan kejadian stunting pada anak usia 6-23 bulan. Total sampel sebanyak 110 anak yang terdiri dari kelompok anak stunting dan tidak stunting sebagai kontrol. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara kehamilan pada usia remaja dengan kejadian stunting. Kehamilan di usia remaja, ditambah dengan kondisi tinggi badan ibu yang pendek, berat badan lahir rendah, serta pendidikan ibu yang rendah berpeluang lebih besar meningkatkan kejadian stunting.¹⁸

Penelitian lain di Kabupaten Lombok Barat membandingkan populasi mikrobiota saluran cerna antara kelompok anak yang memiliki tinggi badan normal dan stunting di Sekolah Dasar di Kabupaten Lombok Barat. Sampel sebanyak 115 siswa sekolah dasar dengan usia 9-12 tahun dan diambil data tinggi badan menurut umur dan analisa mikrobiota usus dari contoh feses. Berdasarkan hasil uji t-test, jumlah bakteri *Lactobacillus* kelompok stunting lebih rendah secara signifikan dibandingkan kelompok normal. Jumlah bakteri *Bifidobacteria*, *Enterobacter*, dan *E. coli* tidak berbeda signifikan antara kedua kelompok. Namun kecenderungannya, *Bifidobacteria* kelompok stunting lebih rendah dibanding kelompok normal. Sedangkan jumlah bakteri *Enterobacter* dan *E. coli* pada kelompok stunting lebih tinggi dibanding kelompok normal.¹⁹

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, dimana pertumbuhan berlebih bakteri pada usus halus berhubungan dengan sanitasi yang buruk dan stunting.^{20,21} Hal ini kemungkinan besar karena tingginya kejadian diare, dimana terjadi pertumbuhan bakteri patogen yang berlebihan pada saluran cerna karena infeksi, environmental enteric dysfunction, dan imun yang rendah saat diare. Selanjutnya probiotik yang ada di saluran cerna akan menurun. Mekanisme ini akan

menyebabkan terjadinya inflamasi dan malabsorpsi zat gizi sehingga menyebabkan stunting. Selain itu, infeksi yang terjadi saat diare ditambah dengan asupan gizi yang buruk akan berujung pada ketidakseimbangan populasi mikrobiota dalam saluran cerna dan malabsorpsi zat gizi, dan akhirnya meningkatkan risiko stunting.²²

Beberapa penelitian sebelumnya juga melakukan telaah terhadap berbagai sumber pustaka. Tinjauan pustaka yang dibuat oleh Budiastutik dan kawan-kawan yang mengidentifikasi faktor risiko stunting di negara berkembang, dimana panjang lahir berisiko 16,43 kali, pendidikan ibu yang rendah berisiko 3,27 kali, anak yang tinggal di desa berisiko 2,45 kali, BBLR berisiko 4,5 kali, tidak ANC berisiko 3,4 kali, tidak imunisasi berisiko 6,38 kali, dan tidak ASI eksklusif berisiko 4,0 kali.²³

Adapun studi literatur lainnya dilakukan oleh Beal dan kawan-kawan juga menemukan bahwa pemberian ASI non-eksklusif untuk 6 bulan pertama, status sosial ekonomi rumah tangga yang rendah, rumah tangga dengan jamban yang tidak memadai, air minum yang tidak diolah, kelahiran prematur, panjang lahir pendek, tinggi ibu yang kurang dan pendidikan yang rendah merupakan faktor penentu stunting yang penting di Indonesia.²⁴

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi dan telaah beberapa sumber, dapat disimpulkan bahwa faktor risiko terjadinya stunting di Indonesia secara konsisten adalah mulai dari faktor ibu, anak, dan lingkungan.

Kejadian stunting meningkat pada kondisi usia ibu saat hamil <20 atau ≥ 35 tahun, lingkaran lengan atas ibu saat hamil $\geq 23,5$ cm, kehamilan pada usia remaja, dan tinggi ibu yang kurang. Hal ini berlanjut ketika ibu sudah melahirkan terkait ASI ataupun MPASI. Inisiasi menyusui dini yang tidak dilakukan, pemberian ASI eksklusif yang tidak dilaksanakan, pemberian MPASI dini sebelum usia 6 bulan, dan kualitas makanan yang kurang terkait asupan energi, protein, kalsium, zat besi, dan seng ditemukan dapat meningkatkan risiko terjadinya stunting.

Selanjutnya tumbuh kembang anak dapat terganggu dan mungkin mengalami stunting jika terdapat riwayat berat badan lahir rendah (BBLR) ataupun prematur, anak dengan jenis kelamin laki-laki, adanya riwayat penyakit neonatal, riwayat diare yang sering dan berulang, riwayat penyakit menular, dan anak tidak mendapat imunisasi.

Lingkungan turut berperan dalam menimbulkan kejadian stunting. Beberapa diantaranya yaitu status sosial ekonomi yang rendah, pendidikan keluarga terutama ibu yang kurang, pendapatan keluarga yang kurang, kebiasaan buang air besar di tempat terbuka seperti sungai atau kebun ataupun jamban yang tidak memadai, air minum yang tidak diolah, dan tingginya pajanan pestisida.

Hasil analisis berbagai sumber ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembaca maupun pemangku kebijakan dalam meningkatkan pelaksanaan berbagai program penanggulangan stunting di Indonesia, demi masa depan anak-anak dan bangsa Indonesia yang lebih baik.

REFERENSI

World Health Organization. Child Stunting. World Health Statistics Data Visualizations Dashboard. (2019). Diakses dari : <https://apps.who.int/gho/data/node.sdg.2-2-viz-1?lang=en#content>.

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). (2017) Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Diakses dari : <https://www.sdg2030indonesia.org/page/1-tujuan-sdg>.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar 2018.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2018). Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

World Health Organization. (2020). Childhood Stunting: Context, Causes and Consequences. Diakses dari: <https://www.who.int/nutrition/healthygrowthproj/en/index1.html>

Purwestri RC, Barati Z, Wirawan NN, *et al.* (2018). What explains stunting among children living in a rice surplus area in Central Java, Indonesia?. Diversity and change in food wellbeing. Diakses dari: http://www.wageningenacademic.com/doi/pdf/10.3920/978-90-8686-864-3_7

Aryastami *et al.* (2017). Low birth weight was the most dominant predictor associated with stunting among children aged 12–23 months in Indonesia BMC Nutrition (2017) 3:16. DOI 10.1186/s40795-017-0130-x

Wellina WF, Kartasurya MI, Rahfilludi MZ. (2016). Faktor risiko stunting pada anak umur 12-24 bulan. Jurnal Gizi Indonesia (ISSN: 1858-4942) Vol. 5, No. 1, Desember 2016: 55-61

Maehara M, Rah JH, Roshita A, *et al.* (2019). Patterns and risk factors of double burden of malnutrition among adolescent girls and boys in Indonesia. PLoS ONE 14(8): e0221273. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221273>

Kartini A, Subagio HW, Hadisaputro S, *et al.* (2019). Pesticide exposure and stunting among children in agricultural areas. *Int J Occup Environ Med.* doi: 10.15171/ijoem.2019.1428

Huriah T, Rahman A, Fitriami E. (2019). The Prevalence and Associated Factors of Stunting Children in Rural Area, Yogyakarta, Indonesia. Third Internasional

Conference on Sustainable Innovation 2019 – Health Science and Nursing. *Advances in Health Sciences Research*, volume 15.

S Lestari *et al.* (2018). The prevalence and risk factors of stunting among primary school children in North Sumatera, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 125 012219.

Sajalia H, Dewi Y, Murti B. (2018). Life Course Epidemiology on the Determinants of Stunting in Children Under Five in East Lombok, West Nusa Tenggara. *Journal of Maternal and Child Health*, 3(4): 242-251. <https://doi.org/10.26911/thejmch.2018.03.04.01>.

Liem S, Marta RF, Panggabean H. Sanitation Behavior and Risk of Stunting: Understanding the Discourse of a Public Service Announcement. *Jurnal The Messenger*, Vol. 11, No. 2, July 2019, pp. 168-181, DOI: 10.26623/themessenger.v11i2.1317.

Torlesse, H., Cronin, A. A., Sebayang, S. K., & Nandy, R. (2016). Determinants of stunting in Indonesian children: Evidence from a cross-sectional survey indicate a prominent role for the water, sanitation and hygiene sector in stunting reduction. *BMC Public Health*, 16(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12889-016-3339-8>

George, C. M., Oldja, L., Perin, J., Sack, R. B., Biswas, S., Ahmed, S., ... Faruque, A. G. (2016). Unsafe Child Feces Disposal is Associated with Environmental Enteropathy and Impaired Growth. *Journal of Pediatrics*. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2016.05.035>

Irwansyah I, Ismail D, Hakimi M. (2016). Teenage pregnancy and the incidence of stunting in children aged 6-23 months in West Lombok. *Berita Kedokteran Masyarakat*, Volume 32 No. 6.

Helmyati S, Yulianti E, Wisnusanti SU. (2017). Condition of gut microbiota among stunted school children in West Lombok. *Jurnal Gizi Pangan*, Maret 2017, 12(1):55-60. DOI: 10.25182/jgp.2017.12.1.55-60

Gough EK, Stephens DA, Moodie EEM, *et al.* (2015). Linear growth faltering in infants is associated with Acidamino- coccus sp. and community level changes in the gut microbiota. *Microbiome* 3(24):1-10. doi:10.1186/s40168-015-0089-2.

Owino V, Ahmed T, Freemark M, & Kelly P. (2016). Environmental enteric dysfunction and growth failure/stunting in global child health. *Pediatrics* 138(6). <http://doi.org/10.1542/peds.2016-0641>.

Donowitz JR, Haque R, Kirkpatrick BD, *et al.* (2016). Small intestine bacterial overgrowth and environmental enteropathy in Bangladeshi children. *mBio* 7(1):1-7. <http://doi.org/10.1128/mBio.02102-15>. Editor.

Budiastutik I, Rahfiludin MZ. (2019). Risk Factors of Child Stunting in Developing Countries. *Amerta Nutr* 122-126. doi: 10.20473/amnt.v3.i3.2019. 122-129

dr. Nur Oktia Nirmalasari

Beal T, Tumilowicz A, Sutrisna A, Izwardy D, Neufeld L. A review of child stunting determinants in Indonesia. *Matern Child Nutr.* 2018;14:e12617. <https://doi.org/10.1111/mcn.12617>

Menjawab Problematika Yang Dihadapi Anak Usia Dini di Masa Pandemi COVID-19

Farida Rohayani

UIN Mataram

anixcalum.cm@gmail.com

Abstract: Anak usia dini saat ini jika disadari merupakan aset masa depan bangsa, orang tua maupun masyarakat. Tanggung jawab terbesar yang harus dilakukan orang tua yakni memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya. Selain itu, kebahagiaan anak menjadi faktor utama baiknya perkembangan anak, baik itu ketika berada di dalam rumah maupun di luar rumah. Oleh karena itu, orang tua harus bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, harmonis dan kasih sayang dalam keluarga untuk mempererat emosional orang tua dengan anak, terlebih lagi selama masa pandemi covid-19 yang mengharuskan anak dan orang tua harus terus menerus berada di rumah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif metode studi kasus eksplorasi dan penelitiannya menggunakan metode studi kasus kualitatif. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan untuk data sekunder diperoleh dari internet berupa data-data yang dipublikasikan, seperti jurnal dan artikel. Hasil penelitian menunjukkan selama pandemi covid-19, ada beberapa masalah yang tampak, seperti ada orang tua yang memberlakukan *gadget* sebagai sahabat anak ketika anak merasa bosan, kurangnya intervensi orang tua pada dunia anak, masalah orang tua dalam menghadapi anak dan juga kejenuhan orang tua dan anak selama masa pandemi ini.

Keywords: *Anak Usia Dini, Orang Tua, Problematika Pandemi Covid-19.*

A. Pendahuluan

Pada tanggal 2 Maret 2020, kasus pertama covid-19 terdeteksi di Indonesia, pertanggal 8 Mei 2020, ada 12,776 kasus dan 930 kematian dilaporkan terjadi di 34 Provinsi. Walaupun demikian, studi model memperkirakan bahwa dari semua kasus infeksi, hanya 2 persen saja yang dilaporkan.¹ Tanpa perawatan dan vaksin, Indonesia dan banyak negara lainnya menerapkan pembatasan interaksi fisik untuk mengatasi pandemi covid-19 ini.²

Pandemi Covid-19 adalah krisis kesehatan yang pertama dan terutama di dunia. Banyak hal yang belum pernah terjadi, bisa terjadi pada pandemi covid-19 ini. Misalnya, penutupan Bandara, penutupan sekolah, baik dari jenjang sekolah dasar

¹ Channel News Asia, "Indonesia's Health System on the Brink as Coronavirus Looms", 25 Maret 2020

² UNICEF, "COVID-19 dan Anak-anak di Indonesia, Agenda Tindakan untuk Mengatasi Tantangan Sosial Ekonomi", (Jakarta: United Nations Children's Fund, 2020)

sampai perguruan tinggi, penutupan toko, pemberlakuan WFH dan lain sebagainya.³ Salah satu dari banyak upaya pemerintah untuk mengurangi penyebaran covid-19 ini yaitu melaksanakan kebijakan untuk meliburkan seluruh aktivitas pendidikan dan menerapkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa secara daring. Dari upaya-upaya yang diterapkan untuk mengurangi penularan covid-19 menimbulkan dampak yang signifikan di berbagai sektor, salah satunya sektor ekonomi, kegiatan sehari-hari dan seluruh aspek kehidupan anak. Dampak ini juga bisa jadi melekat seumur hidup pada sebagian anak, meskipun rentan, tetapi resiko kesehatan akibat infeksi covid-19 pada anak lebih rendah dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih tua. Terdapat 80 juta anak di Indonesia (sekitar 30% dari seluruh populasi) yang berpotensi mengalami dampak serius akibat beragam dampak sekunder yang timbul, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini bisa terjadi semakin buruk, karena perbedaan gender, tingkat pendapatan dan disabilitas. Direktur Eksekutif UNICEF telah menghimbau pemerintah agar menyadari bahwa *“anak-anak adalah korban yang tidak terlibat”*, mengingat adanya dampak jangka pendek dan panjang terhadap kesehatan, kesejahteraan, perkembangan dan masa depan anak.⁴ Di sisi lain, anak yang tidak begitu mengerti tentang covid-19 ini bisa tertekan dan mengalami gangguan mental karena rasa takut yang dimilikinya. Oleh karena itu, orang tua harus cermat mengamati apabila ada tanda-tanda stress yang dialami anak dan tidak mengabaikannya.⁵

Selama masa pandemi yang mengharuskan untuk terus menerus berada di rumah saja, hal ini tentu akan menimbulkan rasa bosan dan stress pada orang tua, terlebih anak. Oleh karena itu, orang tua harus mengerti bagaimana cara agar anak tidak bosan dan jenuh selama berada di rumah. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah dengan memenuhi kebutuhan psikososial anak. Hal ini bisa mengurangi dampak psikososial pada anak, seperti stress yang dapat mempengaruhi perilaku, mental dan aktivitas psikososial. Mengutip dari pernyataan Fitriani dalam Webinar *“Menjaga dan Mengembangkan Aspek Psikososial Anak Usia Dini dalam Situasi Covid-19”* yang digelar Tanoto Foundation, Senin (18/5/2020), yakni *“Dalam kondisi seperti ini, mereka (anak-anak) tidak mengerti apa yang mereka hadapi, kuncinya menjaga rutinitas bagi anak-anak usia dini”*. Hal ini sejalan dengan pernyataan Spesialis Perkembangan Anak ChildFund International di Indonesia, Eka Hidayati mengatakan, *“anak-anak khususnya di usia dua tahun ke atas bisa merasakan bingung di tengah pandemi Covid-19”*.⁶

³ Agus Purwanto, *“Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar”*, Volume 2 Nomor 1 2020, hlm. 1

⁴ UNICEF, *“COVID-19 dan Anak-anak di Indonesia, Agenda Tindakan untuk Mengatasi Tantangan Sosial Ekonomi”*, (Jakarta: United Nations Children’s Fund, 2020)

⁵ Dinda Silviana, *“Gangguan Kesehatan Mental Anak pada Pandemi COVID-19”* dalam <https://tirto.id/pandemi-covid-19-bisa-ganggu-kesehatan-mental-anak-apa-tandanya-eNd7>, diakses pada Rabu, 10 Juni 2020 pukul 20.49

⁶ Wahyu Adityo Prodjo, *“Saat Covid-19, Dukungan Psikososial Anak Penting Diberikan”* dalam <https://edukasi.kompas.com/read/2020/05/18/192637571/saat-covid-19-dukungan-psikososial-anak-penting-diberikan?page=all>, diakses pada Kamis, 4 Juni 2020 pukul 21.30

Psikolog Anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwidjojo mengatakan, “*karakter tangguh dapat meningkatkan kemampuan sang anak untuk lebih memahami orang lain. Hal itu juga tergerak untuk melakukan sesuatu hal positif yang mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Lebih lanjut, Vera menjelaskan bahwa situasi yang penuh dengan ketidakpastian dapat menimbulkan rasa kecemasan berlebih bagi setiap orang termasuk anak. Mencermati hal ini, penting bagi orang tua untuk mengembangkan kekuatan di dalam diri anak agar bisa beradaptasi dalam menghadapi beragam tantangan kehidupan*”.⁷

Jika orang tua sadari, yang dibutuhkan anak hanya perhatian, intervensi orang tua dengan dunia anak, kasih sayang orang tua, rasa nyaman dan aman, tidak hanya pada saat pandemi, akan tetapi sepanjang hidup anak. Akan tetapi, saat ini masih ada orang tua yang kesulitan menciptakan suasana menyenangkan, membangun kedekatan emosional dengan anak, acuh terhadap anak dan anak cukup hanya diberikan *gadget* dan elektronik lainnya. Hal ini memicu kurangnya kehangatan dan keharmonisan dalam keluarga, sehingga anak akan mencari pelarian di luar rumah.

Hal ini dikuatkan dengan laporan dari negara-negara lain menunjukkan adanya peningkatan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak-anak akibat pemberlakuan *lockdown*. Kekhawatiran terkait pendapatan ditambah dengan meningkatnya tekanan bagi orang tua dan pengasuh untuk mengurus anak dan membantu mereka belajar menimbulkan tingkat stress yang tidak biasa yang dapat berujung pada terjadinya kekerasan.⁸

Lockdown juga berdampak menimbulkan lebih banyak beban bagi keluarga dan lembaga untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak-anak tidak dapat melakukan interaksi sosial di sekolah dan bermain di luar, dua hal penting untuk mendukung pembelajaran dan perkembangan mereka.⁹ Dampak *lockdown* juga terlihat pada banyaknya orang tua yang mengeluh terhadap anaknya yang kecanduan *gadget*, dari televisi, telepon genggam hingga tablet. Padahal hal ini sangat membahayakan anak, dapat merusak kesehatan anak, baik fisik maupun mental. Efek merusaknya dalam beberapa hal sebanding dengan kecanduan alkohol atau narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba). Penelitian yang dilakukan oleh *British Heart Foundation* (BHF) menunjukkan bahwa hanya 1 dari 10 balita ‘*generasi ipad*’ yang cukup aktif untuk bisa dikategorikan sehat. Namun, bukan berarti anak harus dihindari sepenuhnya dari *gadget*. Bagaimanapun juga teknologi tetap memiliki peran dalam membantu perkembangan anak, jika orang tua tahu batasannya.

⁷ Marieska Harya Virdhani, “Tips Psikologi Anak Tetap Bisa Kuat Hadapi Pandemi Covid-19”, dalam <https://www.jawapos.com/lifestyle/10/06/2020/tips-psikolog-agar-anak-tetap-bisa-kuat-hadapi-pandemi-covid-19/>, diakses pada Rabu, 10 Juni 2020 pukul 20.49

⁸ Coe, E. dan K. Enomoto, “*Mengembalikan Ketahanan: Dampak COVID-19 Terhadap Kesehatan Mental Dan Penggunaan Obat*”, (McKinsey & Company, April 2020)

⁹ BPS, SUSENAS, 2019

Orang tua yang selalu ingin ‘bebas’. Terlalu asyik main ponsel membuat orang tua ‘melupakan si kecil’. Bermain ponsel sambil mengasuh anak, baik di rumah, di taman atau bahkan di rumah makan merupakan hal yang wajar dan kerap kita saksikan saat ini dan telah dianggap sebagai suatu hal yang lumrah oleh orang tua masa kini. Entah itu membalas *chatting*, *posting* status di Facebook, *nge-tweet* atau membalas email. Hal ini dapat berdampak cukup besar bagi perkembangan anak dan merusak hubungan ikatan sosial antara anak dan orang tua. Padahal bermain dengan anak lebih menyenangkan daripada lebih banyak bermain ponsel. Oleh karena itu, sebaiknya batasilah penggunaan *gadget* ketika sedang bersama anak-anak dan jangan membalas pesan singkat apapun, kecuali benar-benar penting atau menyangkut pekerjaan.¹⁰ Lalu bagaimana dengan situasi selama pandemi covid-19 saat ini? Bagaimana mengurangi kecanduan *gadget* pada anak dan mempererat hubungan sosial-emosional anak dengan orang tua?

KAJIAN TEORI

1. Anak Usia Dini

Secara yuridis, di Indonesia, anak usia dini yakni anak yang berusia 0-6 tahun.¹¹ Anak usia dini merupakan anak yang sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, disebut dengan istilah *golden age* (usia emas), usia yang paling berharga dibandingkan usia-usia selanjutnya.¹² Menurut Beichler dan Snowman, anak usia dini yakni anak yang berusia 3-6 tahun, sedangkan hakikat anak usia dini yakni individu yang unik dengan berbagai macam pola pertumbuhan dan perkembangan.¹³ Perkembangan yang termasuk dalam masa ini meliputi, perkembangan fisik, perkembangan motorik, perkembangan bahasa, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan agama dan moral, perkembangan seks dan sebagainya. Sebagai orang tua hendaknya mengetahui dan dapat menstimulasi setiap perkembangan anak dengan sebaik mungkin, karena upaya mengembangkan perkembangan dan potensi anak sejak dini sebagai salah satu persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.¹⁴

2. Rasa Bosan Anak

Menurut KBBI, arti kata bosan yakni sudah tidak suka terhadap sesuatu karena terlalu sering atau banyak; jemu.¹⁵ Jika dikaitkan dengan pandemi covid-19 ini, anak akan merasa bosan karena beberapa hal, yakni keharusan untuk selalu diam di rumah, melakukan segala sesuatu di dalam rumah. Jika orang tua sadari, hal ini karena anak usia dini masih belum bisa mengontrol emosinya, tapi bukan berarti orang tua acuh

¹⁰ Nyi Mas Diane Wulansari, “*Didiklah Anak Sesuai Zaman*”, (Jakarta: PT. Visimedia Pustaka, 2017) hlm. 28-35

¹¹ Suyadi, “*Teori Pembelajaran Anak Usia Dini Dalam Kajian Neurosains*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 23

¹² Suyadi, “*Manajemen PAUD cet. I*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 3

¹³ Idad Suhada, “*Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini (Raudlatul Athfal)*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 109

¹⁴ Mansur, “*Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.19

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

dan membiarkan begitu saja. Saat ini, ketika anak tantrum atau bosan, orang tua memberikan apa saja agar anak tenang kembali sebagai pengalihan rasa anak, memberikan *gadget* misalnya dan juga karena faktor “*tidak tega*” orang tua melihat anaknya menangis dan merengek. Hal ini akan menjadi *boomerang* tersendiri bagi orang tua dan berkelanjutan sampai anak susah dikontrol. Sebenarnya, ada kondisi di mana anak harus dilatih untuk sabar, menunggu dan menghargai orang lain. Tidak semua tantrum dan bosan, harus dituruti orang tua.

“Saya seorang terapis yang sudah sering menangani anak-anak, orang tua dan guru. Saya sangat setuju pada pesan guru bahwa anak-anak berkembang semakin buruk dalam beberapa aspek. Selama menjadi terapis, saya sering mendapati anak yang antisosial, emosional dan rendah dalam hal akademik. Hal ini karena faktor gaya hidup modern dan individualistis.” Ungkap Victoria Prooday, seperti dikutip dari *Dee Proots at Home*.

Melalui lingkungan keluarga, orang tua bisa membentuk otak dan mental anak menjadi lebih kuat atau lemah. Namun saat ini, orang tua justru mendidik anak ke arah yang salah. Orang tua tidak mengarahkan rasa bosan, tantrum anak dengan hal yang baik. Hal ini yang menyebabkan anak cepat marah, tak kuat mental, serta tak mampu mengatasi kebosanannya.

a. Teknologi

Saat ini, berbagai macam teknologi, seperti *gadget*, TV, *game* merupakan hal yang sangat melekat pada anak. Jika tidak diberikan, anak akan uring-uringan dan marah. Kebanyakan orang tua langsung memberikan *gadget* untuk menghindari amarah dan rasa bosan anak. Hal ini menjadikan anak kecanduan dengan *gadget*. Kecanduan *gadget* membuat anak jadi malas untuk melakukan aktivitas fisik seperti bermain di halaman, memanjat pohon, berlarian bersama teman menjadi sangat membosankan. Yang seharusnya anak harus banyak melakukan aktivitas fisik untuk merangsang perkembangan anak.

Paparan teknologi yang berlebihan juga menyebabkan kemampuan anak dalam menangkap stimulasi, daya mengingat akan jadi menurun. Hal ini akan berdampak dapat kemampuan akademik dan menjadikan anak antisosial, baik dengan keluarga maupun dengan orang lain.

b. Selalu menuruti permintaan anak

“Aku lapar!” langsung berhenti di rumah makan. *“Aku haus!”* langsung beli minuman. *“Aku bosan!”* langsung memberikan *gadget* pada anak. Kemampuan untuk menahan keinginan adalah salah satu faktor kesuksesan anak. Semua orang tua menginginkan anaknya bahagia, namun selalu membahagiakan anak akan membuat kesulitan di masa depan. Dengan melatih anak menahan dan bersabar terhadap keinginannya akan melatih anak agar mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

c. Anak memegang kendali

“Anak saya tidak suka sayuran”, “Kalau anak saya sering tidur larut malam”, “Anakku tidak suka sarapan pagi”. “Kalau anak saya sih tidak suka mainan, tapi sukanya iPad”.

Ini keluhan yang sering dilontarkan oleh para ibu. Sejak kapan anak mengatur orang tua ? jika dibiarkan saja semua tergantung anak, hidup mereka tidak akan teratur. Hanya karena ingin menyenangkan anak atau tak tega mendengar regekan dan tangisannya, jangan sampai anak memegang kendali. Sebaliknya, orang tua lah pemegang otoritas penuh terkait aturan di rumah.

d. Kurangnya interaksi sosial

Orang tua sibuk, anak kurang mendapat perhatian. Seringkali orang tua memberikan *gadget* pada anak ketika mereka sedang bekerja, tujuannya agar anak tidak rewel dan tidak mengganggu pekerjaannya. Sebenarnya yang dibutuhkan anak adalah orang tua yang ikut bermain, interaksi mata, sentuhan, ekspresi dan reaksi untuk mengasah kemampuan sosialnya. Sehingga anak tahu bagaimana harus bersikap ketika bermain, menghadapi kekalahan, bersaing dengan sehat, menghadapi masalah, membuat taktik dan belajar membaca situasi.¹⁶

3. Pengaruh *Gadget* pada Anak

Perkembangan zaman modern saat ini sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Bukan hanya di negara-negara maju, Indonesia juga menjadi terkena dampak kemajuan IPTEK tersebut. (Ameliola & Nugraha, 2013). Salah satu teknologi yang sangat populer dan dekat dengan kehidupan saat ini yaitu *gadget*, tidak hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Hal ini menyebabkan pasar elektronik menjadikan anak-anak sebagai target pemasaran dan sebagai konsumen aktif pengguna *gadget* (Fathoni, 2017).

Survey yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terkait pengguna internet pada anak-anak Indonesia mulai dengan bersentuhan dengan internet. Berdasarkan statistik pengguna internet Indonesia, APJII mengklasifikasikan sembilan kategori usia dari anak-anak hingga orang tua. hasilnya, generasi produktif dengan umur 25-29 tahun menjadi yang teratas dengan jumlah 24 juta. Angka 24 juta tersebut disaingi oleh pengguna internet pada kisaran 35-39 tahun. Kemudian disusul dengan 30-34 tahun mencapai 23,3 juta. Selanjutnya umur 20-24 tahun (22,3 juta), 40-44 tahun (26,9 juta), <50 tahun (1,5 juta) dan 10-14 tahun

¹⁶ Mutia nugraheni, “Pemicu Anak Mudah Bosan dan Cepat Marah” dalam <https://parenting.dream.co.id/ibu-dan-anak/tak-terduga-ini-pemicu-anak-mudah-bosan-dan-cepat-marah-170922u.html>, diakses pada Kamis, 04 Juni 2020 pukul 09.30

dengan 768 ribu. Jumlah total pengguna internet Indonesia sebanyak 132,7 juta. Angka ini mengalami kenaikan 51,8 % dari *survey* APJII 2014 sebanyak 88 juta pengguna (Viva, 2016).

Hal ini terjadi karena tidak adanya pengawasan yang baik dari orang tua terhadap anak-anak. Lingkungan keluarga merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan anak. Pengaruh lingkungan keluarga yang baik akan berdampak baik bagi perkembangan anak yang akan berpengaruh terhadap karakter dan perilaku anak.

Peran orang tua akan sangat berpengaruh dalam membentuk karakter anak. Orang tua merupakan teladan bagi anak untuk berperilaku, berbicara serta bersosialisasi dengan dunia luar. Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, banyak orang tua yang merasa terbantu dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Hal ini dibuktikan dengan adanya varian *gadget* yang meliputi *smartphone*, laptop, kamera, tablet dan sebagainya. Tetapi dewasa ini, realitanya kebanyakan orang tua masih keliru menggunakan *gadget* yang seharusnya dapat mengedukasi anak-anak mereka. Sebaliknya, orang tua memberikan penguasaan penuh terhadap *gadget* untuk anak tanpa disandingkan dengan batasan dan pengawasan. Hal ini akan berdampak, secara langsung maupun tidak langsung menjadi *boomerang* bagi orang tua ketika anak mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan *gadget* dibandingkan bersosialisasi dengan keluarga maupun orang lain.

Walaupun memiliki dampak positif, penggunaan *gadget* yang berlebihan bagi anak juga menimbulkan beberapa dampak negatif. Dokter anak asal Amerika Serikat, Cris Rowan, dalam tulisannya di *Huffington Post*, mengatakan harus ada larangan penggunaan *gadget* untuk anak usia di bawah 12 tahun karena dapat menimbulkan dampak negatif, diantaranya pertumbuhan otak yang terlalu cepat, gangguan tidur, obesitas, penyakit mental, agresif serta pikun digital.

Ketertarikan anak terhadap *gadget* dikarenakan banyak hal yang memang menarik darinya. Baik berupa *game* dan juga fitur-fitur menarik lainnya. Hal ini yang tidak akan ditemukan anak pada media lainnya, seperti buku, majalah, komik dan lain sebagainya. Anak bisa mengakses segala hal yang diinginkannya secara tak terbatas. Inilah yang menyebabkan anak betah berlama-lama dengan *gadget* sehingga tidak memperdulikan kesehatan dan lingkungan sekitarnya.¹⁷

Anak merupakan peniru ulung, anak akan mengikuti apa yang dilakukan orang tuanya. Orang tua saat ini juga lebih banyak menghabiskan waktunya dengan *gadget* daripada berbincang dengan anak mereka. Sebagian juga gagal dalam menjalankan

¹⁷ Jordan Efraim Palar, Franly Oniba dan Wenda Oroh, "Hubungan Peran Keluarga dalam Menghindari Dampak Negatif Penggunaan Gadget pada Anak dengan Perilaku Anak dalam Penggunaan Gadget di Desa Kiawa 2 Barat Kecamatan Kawangkoan Utara", Volume 6 Nomor 2, 2008, hlm. 2-5

aturan-aturan yang telah mereka buat bagi anak-anak dalam keluarga, salah satunya dalam penggunaan *gadget* dan media elektronik lainnya (Fathoni, 2017).

Oleh karena itu, sadarilah bahwa orang tua merupakan teladan bagi anak-anak mereka. Segala hal baik harus dimulai sejak dini, dimana orang tua juga harus menjauhkan jangkauan anak dari *gadget* sampai pada waktu anak sudah pantas untuk menggunakan *gadget* tetap dengan pengawasan dan bimbingan orang tua. Jika anak sudah terlanjur dengan *gadget*-nya, orang tua dapat melakukan pendekatan dengan memberikan pengalihan terhadap *gadget* dengan hal yang lebih menarik. Biasakan orang tua bisa seperti *gadget*, yakni menjawab hal-hal yang kiranya anak tidak tahu dan pahami serta jawaban terhadap masalah yang sedang anak alami. Sebaiknya lebih sering berbincang dan menemani anak dalam belajar, bermain, liburan, berolah raga dan memberikan hiburan yang mendidik tetapi tidak membosankan bagi mereka (Nureda, 2016).

Penjabaran di atas beberapa dari banyak alasan pemicu kebosanan anak yang harusnya orang tua pahami dan intervensi lebih dalam ke dunia anak. Lalu bagaimana saat pandemi covid 19 saat ini ? bagaimana mengatasi kebosanan anak ? Bagaimana membangun hubungan yang baik antara orang tua dan anak?

Metode Penelitian

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode studi kasus eksplorasi dan penelitiannya menggunakan metode studi kasus kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang anak selama pandemi covid-19. Dalam penelitian ini, responden sebanyak 8 orang, yang terdiri dari seorang guru SD, seorang psikolog dan 5 orang tua yang memiliki anak usia dini berusia 3-8 tahun. Wawancara yang dilakukan yakni wawancara pembicaraan informal, yaitu wawancara yang pertanyaannya bergantung pada eneliti/pewawancara, bersifat spontan dalam suasana yang biasa dan wajar, sehingga terwawancara tidak mengetahui atau tidak menyadari ia sedang diwawancara dan hal ini dilakukan secara *online*.¹⁸ Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan untuk data sekunder diperoleh dari internet berupa data-data yang dipublikasikan, seperti jurnal dan artikel.

B. Pembahasan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai anak usia dini selama covid-19 melalui wawancara beberapa responden. Berdasarkan hasil wawancara via *online* dengan beberapa responden terkait, yakni:

1. Istiqomah, S.Pd.I (26 th), seorang guru SD.

“Ada dua kasus anak-anak yang ada di sekitar tempat tinggal saya, yang pertama, anak-anak selama covid lebih banyak bermain dari pada sebelumnya, mereka bermain dengan teman sebaya di luar rumah, sampai susah dikontrol oleh orang tua mereka.

¹⁸ Lexy J. Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif edisi Revisi”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 187

Yang kedua, ada beberapa anak yang mengikuti pembelajaran daring, jadi anak-anak diberikan tugas oleh guru mereka dan dikumpulkan secara online, selain itu mereka juga menyetor hafalan kepada guru mereka via online”.

2. Helmi Ar-Rasyid, (Wiraswasta)

“Perubahan yang terjadi pada anak saya selama covid-19 yakni mereka jika keluar rumah, misalnya ke rumah kerabat harus menggunakan masker, tidurnya juga jadi lebih cepat dari sebelumnya. Saya selalu mengusahakan untuk anak betah di dalam rumah daripada harus bermain di luar rumah, salah satunya dengan memberikan tontonan-tontonan yang sesuai dengan usia mereka, upin-ipin dan beberapa film edukasi islami lainnya dan bermain di dalam rumah. Akan tetapi beberapa waktu ini lebih sering main di luar rumah dengan teman-temannya”.

3. Sayu Kadek Jelantik (Dosen)

“Ada hal positif dan negatif yang ditemukan selama pandemi covid-19 dalam diri anak saya, positifnya adalah dia banyak mengenal tata cara dan pengetahuan baru terkait covid-19, misalnya tidak boleh keluar selama pandemi covid-19, jika terpaksa keluar rumah maka harus menggunakan masker, cuci tangan setelah beraktifitas, tata cara batuk dan bersin. Hal negatifnya, ketika dia bosan maka dia akan menangis dan mina ke mall, kolam renang, makan di luar dan lain-lain. Jika dia sudah mulai tantrum, saya sebagai orang tua memberikan penjelasan padanya dengan bahasa yang mereka pahami, misalnya ketika dia merengek minta ke mall, saya sebagai orang tua menjawab: sekarang sedang ada virus corona nak, jadi mallnya ditutup dulu agar orang-orang tidak sakit, makanya kita harus di rumah dulu ya. Selain melalui penjelasan, kadang saya ajak dia ke luar rumah dan memberikan bukti nyata tentang penjelasan-penjelasan saya sebelumnya. Jadi ketika dia sudah mengerti, dia jadi jarang untuk minta keluar lagi”.

4. Y, (Dosen)

“Anak-anak benar-benar lockdown tidak ke luar rumah sama sekali. Jadi saya membuatkan jadwal untuk mereka, ada waktu belajar, baca buku, nulis (walaupun tidak rutin) dan anak saya yang paling kecil malah lebih taat jadwal dibandingkan dengan kakak-kakaknya, tetapi memang ada perubahan dari setiap anak. Positifnya, ritual ibadah anak meningkat, lebih kreatif memanfaatkan gadget (bikin animasi sederhana). Waktu luang digunakan untuk main bersama, nonton film dan belajar masak. Negatifnya, anak jadi tidur lebih larut dari biasanya dan tidak nyenyak, jadi ketika habis subuh sering tidur lagi”.

5. Y, (Psikolog)

“Perubahan yang terjadi hanya dalam bentuk perilaku, misalnya sulit bangun pagi, habis shalat subuh tidur lagi. Ketika dia bosan saya coba ajak main, biasanya main Uno, Badminton atau pimon. Untuk proses pembelajaran, saat ini dia sudah tidak mengikuti daring, jadi inisiatif saya sebagai kakak dan orang tua di rumah untuk membuatkan jadwal belajar dan belajar bersama”.

6. Misnawati Rodiyah, S.Pd.I (26 tahun), wiraswasta

“Pasti ada positif dan negatifnya. Negatifnya anak saya jadi cepat bosan, sering tantrum juga. Cepat marah, protes, masih malas belajar dan sering tidak terima jika diberi tahu

atau diingatkan. kadang ketika dia tantrum, saya diamkan saja dan saya pergi, nanti pasti dia datang dan minta maaf. Positifnya lebih rajin mewarnai, menulis, mengaji dan tidak mau ke luar main dengan teman-temannya, karena sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang covid-19 ini, dia paham jika ke luar aka nada virus corona. Jadi, dia lebih memilih diam di rumah dan bermain di dalam rumah”.

7. Zainul Imron (32 tahun), (Gurus SD)

“Selama pandemi ini, saya bekerjasama dengan istri saya agar anak tidak merasa kurang kasih sayang, karena saya dan istri sama-sama WFH. Perubahan sikap pasti ada, sebelumnya anak saya selalu keluar bermain, tetapi sejak covid-19 kurang lebih dua bulan tetap di rumah saja. Ketika anak bosan, biasanya kami sebagai orang tua mengajak anak untuk main bersama, membaca buku kesukaan anak atau nonton video edukasi yang telah kami siapkan. Kami juga member pemahaman tentang covid-19 ini, mengajarkan upaya pencegahan covid-19, misalnya cuci tangan setelah beraktivitas, terutama jika keluar rumah, menggunakan masker ketika keluar rumah, memakai hand sanitizer dan tidak membiasakan mencium tangan kepada orang yang bertamu ke rumah. ketika malam hari sebelum tidur, saya membacakan cerita yang dia sukai dan juga menceritakan tentang aktivitas yang telah dilakukan pada hari itu”

8. X, (ibu Rumah Tangga)

“Selama pandemi covid-19, awalnya mereka memang diam di rumah, tidak keluar karena saya menjelaskan ada virus yang berbahaya, akan tetapi semakin lama anak-anak semakin bosan dan jadi semakin malas belajar, bahkan saat ini malah sering rebutan hp dengan kakaknya. Sering ribut dan susah dikontrol. Maunya main hp terus sepanjang hari. Jika bosan, saya marah dan mereka main ke luar rumah sampai menjelang magrib. Intinya mereka jadi susah diatur dan tidak mau mendengarkan kata-kata saya, jika dinasehati mereka malah marah-marah. Yaudah saya biarkan saja, saya juga bingung harus melakukan apa”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa selama covid-19, anak banyak mengalami perubahan, perubahan positif dan juga negatif, baik sikap maupun emosi. Pada awalnya, anak masih mau menuruti ajaran orang tua untuk tetap berada di rumah saja, hal ini juga karena sejak awal orang tua telah memberi pemahaman tentang bagaimana bahayanya covid-19. Akan tetapi, semakin hari anak merasa bosan dan tidak betah berada di rumah, hal ini tidak hanya dirasakan oleh anak, tetapi juga orang tua juga. Hal ini dikarenakan beberapa hal, yakni, ada orang tua yang kesulitan menciptakan suasana menyenangkan di dalam rumah, orang tua yang acuh terhadap anak dan hanya bergantung pada *gadget* dan elektronik, kurangnya kehangatan dan keharmonisan dalam keluarga, sehingga anak akan mencari pelarian di luar rumah dan masih ada orang tua yang kesulitan untuk menyikapi kebosanan dan perubahan sikap anak.

Ketergantungan anak pada *gadget* dan elektronik lainnya selain dapat mempengaruhi perkembangan anak, juga menjadikan anak menjadi seorang yang anti sosial, apalagi di tengah situasi pandemi covid-19 dan *lockdown* saat ini. Ketergantuan

atau kecanduan yang dialami anak ini dikarenakan di dalam sel otak, saat seseorang memiliki keterkaitan (kecanduan) terhadap sesuatu, ada jaringan saraf baru yang terbentuk. Ketika “*candu*” tersebut tiba-tiba hilang, saraf itu seolah-olah meroantaron. Untuk menghindarinya, perlu adanya pengganti keterikatan (*candu*) tersebut.¹⁹ Ada beberapa cara bijak mengatasi kecanduan *gadget* pada anak, yakni:

1. Membatasi Penggunaan

Batasi penggunaan *gadget* sesuai dengan rekomendasi kelompok usia anak. *The American Academy of Pediatrics* (2003) dan *Canadian Paediatric Society* (2010) telah menerbitkan pedoman *screen time*, seperti berikut:

- a. Anak-anak di bawah usia 3 tahun sebaiknya tidak diberikan izin bermain *gadget*, termasuk TV, *smartphone* atau tablet.
- b. Anak-anak usia 3 hingga 4 tahun sebaiknya tidak diberikan izin kurang dari satu jam dalam sehari.
- c. Anak-anak usia 5 tahun ke atas sebaiknya menggunakan *gadget* tidak lebih dari dua jam dalam sehari untuk penggunaan rekreasi (di luar kebutuhan belajar).

2. Beri Jadwal

Buatlah jadwal yang tepat untuk anak bermain *gadget*. Di luar itu, orang tua harus menyiapkan alternatif kegiatan yang dapat mengalihkan perhatian anak dari *gadget*.

3. Pengawasan

Letakkan TV atau komputer di ruang keluarga. Dengan demikian, setiap kali anak menggunakannya, dia tidak sendirian dan selalu dalam pengawasan orang tua ataupun anggota keluarga lainnya. Selain itu perangkat digital (*smartphone*) juga sebaiknya tidak diserahkan pada anak sepenuhnya, biarkan anak meminta izin dahulu sebelum menggunakannya dan ambil kembali setelah selesai.

4. Tetapkan Wilayah Bebas *Gadget*

Buat peraturan tidak boleh menggunakan *gadget* di tempat-tempat tertentu, misalnya di meja makan, kamar tidur dan mobil.

5. Ajarkan Anak Tentang Menahan Diri

Berilah *reward* pada anak ketika dia berhasil menahan diri untuk tidak bermain *game* dan mengikuti aturan yang telah disepakati.

6. Berikan Contoh yang Baik

¹⁹ Nyi Mas Diane Wulansari, “*Didiklah Anak Sesuai Zaman*”, (Jakarta: PT. Visimedia Pustaka, 2017) hlm.50

Anak merupakan peniru ulung. Anak akan meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Untuk itu, orang tua harus bisa menjadi contoh yang baik untuk anak. Letakkan ponsel dan bermainlah bersama anak.²⁰

Sebuah penelitian tentang rumah tangga menemukan berbagai jenis lingkungan media. Sebuah penelitian *Northwestern University*, yang melibatkan 2.300 orang tua dari anak-anak usia 0-8 tahun, menemukan tiga model: “media-sentris”, “moderat media”, dan “minim-media”.²¹

1. Lebih dari sepertiga orang tua (39%) menerapkan model *media-sentris*. Mereka menciptakan lingkungan rumah tangga yang berpusat di layar elektronik, selalu menyalakan televisi, ada perangkat televisi di masing-masing kamar anak, juga sering menonton konten bersama-sama. Anak-anak di keluarga ini menggunakan layar elektronik selama kira-kira lima jam per hari.
2. Hampir separuh dari sampel penelitian (45%) merupakan orang tua yang *moderat media*. Keluarga ini cinta media, tapi kegiatan berkelompok lainnya pun merupakan bagian penting dalam hidup mereka. Anak-anak mereka menghabiskan tiga jam per hari di depan layar.
3. Sebanyak 16% dari sampel penelitian merupakan orang tua *minim media*. Mereka menghabiskan kurang dari satu jam di depan layar televisi dan anak-anak mereka menggunakan lebih sedikit waktu di depan layar elektronik (1 jam 35 menit perhari).²²

Seperti yang terlihat pada hasil penelitian di atas, anak selalu terpengaruh oleh teladan dari orang tua. Ketika anak masih kecil, orang tua berkewajiban untuk benar-benar menentukan lingkungan media seperti apa yang akan kita terapkan untuk anak. Memulai sedini mungkin dari hal-hal kecil, untuk menetapkan dasar-dasar kebiasaan media keluarga kita di masa depan. Setiap orang tua berhak memilih dan menentukan lingkungan media seperti apa yang akan diterapkan dalam keluarganya. Terima dan jalani pilihan yang telah ditentukan dan sadarilah bahwa anak-anak akan menirunya.

Selain kecanduan *gadget* dan barang elektronik lainnya, sudah pasti banyak kendala-kendala yang terjadi di rumah dan banyak keluhan dari anak-anak tentang kapan pandemi ini akan berakhir, kapan mereka akan masuk sekolah dan kapan bisa bermain di luar rumah bersama teman-teman lagi. Saat orang tua mengalami kecemasan berlebihan, stress terkait pekerjaan, tak jarang hal ini akan melimpahkannya pada anak. Anak akan menangkap sinyal-sinyal emosi negatif dari perlakuan orang tua, misalnya anak jadi ikut cemas, rewel, tantrum bahkan sering

²⁰ *Ibid*, hlm. 30

²¹ ----, “*Parenting in the Age of Digital Technology: A National Survey (Northwestern University: Center on Media and Human Development, 2013*

²² Yalda, “*Menjadi Orang Tua Bijak di Era Digital, Media Moms and Digital Daddy*”, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), hlm. 16

mencari perhatian. Hal ini akan menjadi beban bagi orang tua bila tidak paham apa yang harus mereka lakukan.²³

Situasi ini tidaklah mudah bagi setiap orang, khususnya orang tua. Bekerjasama dengan inisiatif *Parenting for Lifelong Health*, UNICEF mengumpulkan beberapa alternatif praktis untuk membantu para orang tua dan pengasuh selama pandemi covid-19 ini. Diantaranya yakni: a) waktu berkualitas dengan anak; b) tetap positif; c) buat jadwal; d) mengatasi perilaku kurang baik; e) tetap tenang dan kelola stress dan f) mendiskusikan covid-19. Penjabaran dari beberapa alternatif tersebut sebagai berikut :

1. Waktu berkualitas dengan anak

Dalam setiap musibah pasti ada hikmah dibaliknya. Hal ini juga bisa dirasakan dalam keluarga. Selama *lockdown* hubungan dengan keluarga terutama anak bisa semakin dekat. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa kegiatan yang bisa dirancang orang tua untuk anaknya. beberapa cara untuk membuat kegiatan yang menarik untuk anak.

a. Tetapkan jadwal untuk berkegiatan dengan anak

Tetapkan durasi waktu kegiatan, misalnya 20 menit atau lebih lama, tergantung kesepakatan orang tua. Lakukan hal ini secara rutin sesuai jadwal setiap hari agar ada sesuatu yang bisa dinantikan anak.

b. Minta anak memilih jenis kegiatan

Berdisukusi dengan anak tentang jenis kegiatan apa yang kiranya bisa dilakukan bersama-sama. Hal ini dapat membangun rasa percaya diri anak.

c. Ide kegiatan dengan bayi/balita

- 1) Meniru ekspresi wajah atau suara;
- 2) Menyanyikan lagu, membuat irama dengan mengetuk benda-benda sekitar seperti panci dan sendok;
- 3) Menumpuk balok atau cangkir mainan;
- 4) Mendongeng, membacakan buku atau memperlihatkan gambar-gambar menarik.

d. Ide kegiatan dengan anak usia TK/Sekolah Dasar

- 1) Membacakan buku atau melihat-lihat gambar;
- 2) Berjalan kaki di alam terbuka atau di sekitar rumah;
- 3) Menari dan bernyanyi;
- 4) Melibatkan anak dalam pekerjaan rumah, bergotong-royong membersihkan rumah dan memasak bisa dijadikan permainan seru;
- 5) Membantu anak mengerjakan tugas sekolah.

e. Ide kegiatan dengan remaja

²³ Republika, "Hubungan Ibu-Anak Hadapi Stres Social Distancing Covid-19", Kamis, 02 April 2020 17:46 WIB

- 1) Ajak anak mengobrol tentang topik yang mereka minati: olah raga, musik, teman sepermainan atau hal-hal yang berkaitan dengan hobi anak;
- 2) Berjalan kaki di alam terbuka atau di sekitar rumah;
- 3) Berolah raga bersama diiringi musik kesukaan anak.

2. Tetap Positif

Menjaga suasana hati anak agar tetap baik tidaklah mudah dengan berbagai macam tingkat lakunya. Sering kali akhirnya orang tua mengahardik dan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti anak. Padahal anak akan lebih menurut jika diperlakukan dengan lembut dan penuh kasih sayang.

- a. Fokus pada perilaku yang orang tua inginkan
Gunakan kalimat positif saat meminta anak melakukan sesuatu.
Contoh : “Tolong, simpan bajumu, ya!”, “Kita rapikan mainannya sama-sama yuk!.
- b. Nada suara itu penting
Membentak anak tidak akan menyelesaikan masalah, sebaliknya hanya akan menambah rasa sakit, stress dan marah, baik pada diri orang tua maupun anak. Cobalah merubah cara penyelesaian masalah dengan berbicara yang baik dan tenang dengan anak.
- c. Pujian untuk anak
Memuji anak, baik anak usia dini maupun remaja merupakan hal yang baik dan membuat anak lebih percaya diri. Selain itu, pujian merupakan salah satu perilaku yang menunjukkan perhatian dan kepedulian orang tua terhadap anak. Pujian ini diberikan jika anak menunjukkan perilaku yang baik dan berhasil dalam menyelesaikan suatu pencapaian.
- d. Tetap realistis
Ketika orang tua meminta anak untuk melakukan sesuatu, sebaiknya harus realistis untuk dilaksanakan oleh anak. Anak usia muda biasanya kesulitan untuk tetap tenang di dalam rumah sepanjang hari.
- e. Bantu hubungan anak tetap dekat dengan teman-temannya
Anak remaja memiliki kebutuhan lebih besar untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Bantu anak tetap terhubung dengan teman-temannya melalui media sosial dan cara lain dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan.

3. Buat Jadwal

Covid-19 menghentikan rutinitas di luar rumah, seperti bekerja dan sekolah. Ini salah satu situasi yang sulit bagi semua orang terutama anak,

baik anak usia dini maupun remaja. Oleh karena itu, sebaiknya buatlah rutinitas baru bersama keluarga selama di rumah.

- a. Rutinitas fleksibel, namun konsisten
 - 1) Buatlah jadwal untuk orang tua dan anak. Buatlah kegiatan yang terarah dan bernilai positif dan mengandung unsur permainan agar anak tidak bosan.
 - 2) Melibatkan anak dalam membuat jadwal, misalnya jadwal pelajaran. Hal ini akan menjadikan anak memiliki rasa tanggung jawab untuk mematuhi jadwal yang telah dibuat.
 - 3) Buatlah jadwal berolah raga setiap harinya. Olah raga membantu meredakan stress dan menyalurkan energi anak.
4. Ajarkan anak tentang jarak aman dan cara mempertahankannya
 - a. Bawa anak ke luar rumah, jika masih diperbolehkan.
 - b. Buat surat atau gambar untuk dilihat orang lain. Tempelkan di jendela atau dinding rumah agar bisa dilihat.
 - c. Yakinkan anak, sampaikan cara-cara yang akan dilakukan agar mereka tetap aman.
 - d. Dengarkan saran mereka dan pertimbangkan dengan serius.
 - e. Cuci tangan dan bersih-bersih menyenangkan
 - 1) Buatlah lagu cuci tangan dan gaya sederhana yang menarik agar anak mau mencuci tangan.
 - 2) Berikan anak pujian atau poin jika mencuci tangan dengan teratur.
 - 3) Buat permainan bertema sentuhan wajah. Pemenangnya adalah orang yang paling jarang menyentuh wajah (silahkan jadi juri dengan menghitung skor setiap orang).
5. Ingat, orang tua adalah panutan bagi anak

Anak merupakan peniru ulung dan orang tua harus memberikan contoh yang baik setiap harinya. Misalnya, mulailah dari diri sendiri (orang tua) dalam menerapkan jaga jarak dan kebersihan serta memperlakukan orang lain dengan baik.

Pada malam hari, ajaklah anak untuk mengevaluasi dan berefleksi tentang hari mereka. Sampaikan satu hal positif atau menyenangkan yang dilakukan anak. Jangan lupa memberikan pujian ataupun reward atas perilaku baik anak.
6. Mengatasi perilaku kurang baik

Semua anak pernah berperilaku kurang baik, yang disebabkan anak lapar, lelah, takut, bosan atau sedang belajar mandiri. Hal ini juga terjadi sebab jenuh karena terus menerus berada di dalam rumah. Ini merupakan tugas orang tua untuk bisa mengatasi kejenuhan anak.

a. Alihkan

- 1) Atasi segera perilaku kurang baik dan alihkan perhatian anak ke perilaku yang baik.
- 2) Hentikan sebelum dimulai. Jika anak terlihat gelisah, alihkan perhatiannya dengan menawarkan kegiatan menarik atau menyenangkan, seperti mengajak mereka berjalan-jalan di sekitar rumah, bermain dan melakukan hal-hal menarik lainnya.

b. Relaksasi

Orang tua juga bisa merasakan jenuh dan frustrasi selama karantina di rumah. Oleh karena itu, sebaiknya melakukan relaksasi sejenak. Ambil sepuluh detik untuk bernapas tenang. Hirup dan hembuskan napas perlahan sebanyak lima kali, kemudian hadapi situasi dengan lebih tenang.

c. Ajarkan anak konsekuensi

Konsekuensi membantu anak untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Konsekuensi juga menanamkan disiplin pada anak. Hal ini jauh lebih baik dibandingkan memukul atau membentak.

- 1) Beritahu anak untuk mengikuti arahan orang sebelum mendapat konsekuensi.
- 2) Orang tua harus tegas dan tenang saat memberikan konsekuensi.
- 3) Konsekuensi harus sesuai dengan kemampuan anak.
- 4) Berikan anak kesempatan memperbaiki kesalahan dan berikan *reward* dalam bentuk apapun.
- 5) Waktu berkualitas, pujian, *reward* dan rutinitas menyenangkan dapat membantu mengurangi perilaku kurang baik anak.

d. Mendiskusikan covid-19

Berdiskusilah dengan anak, sampaikan informasi tentang covid-19 dengan bahasa yang mudah anak pahami agar anak tidak mengerti tentang situasi dan kondisi yang sedang terjadi.

1) Bersikap terbuka dengan anak

Merupakan sebuah keharusan orang tua untuk bersikap terbuka kepada anak. Ajaklah anak berbicara mengenai topik yang sedang terjadi. Beri anak beberapa pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman anak, yang pasti menggunakan bahasa atau ilustrasi sederhana yang sesuai dengan tingkat pemahaman anak. Menggambar, bercerita terkait topik yang sedang terjadi dan aktivitas lainnya dapat membantu membuka percakapan.

Izinkan anak untuk bebas berbicara dan berpendapat, jangan meremehkan dan menghindari keresahan anak. Pastikan orang tua

mengakui perasaan anak dan meyakinkan anak bahwa wajar untuk merasa takut tentang hal ini. Akan tetapi orang tua juga harus meyakinkan anak bahwa ada beberapa cara pencegahan agar tidak merasa takut.

2) Bersikap jujur kepada anak

Jawablah setiap pertanyaan anak dengan jujur dan sesuai dengan kondisi yang terjadi, tidak ada yang perlu disembunyikan. Pertimbangkan usia anak dan tingkat pemahaman informasi anak. Gunakan bahasa yang sesuai dengan usia, perhatikan reaksi mereka dan pekalah terhadap tingkat kecemasan mereka.

3) Bersikap mendukung

Kadangkala anak sering merasa takut atau bingung untuk mengungkapkan perasaannya. Yakinkan anak bahwa kita sebagai orang tua ada untuk mereka dan berikan kesempatan untuk menyampaikan. Orang tua dapat membantu anak-anak mengatasi stress dan rasa takut dengan menciptakan suasana yang kondusif untuk bermain dan bersantai, jika memungkinkan.

4) Tunjukkan pada anak cara melindungi diri dan teman-teman mereka

Salah satu cara terbaik untuk menjaga anak-anak dari covid-19 dan penyakit lain yakni mengajarkan mereka tentang pentingnya mencuci tangan dengan sabun, terutama setelah beraktivitas serta cara batuk dan bersin yang benar, yakni dengan menutup mulut dengan siku ketika batuk atau bersin. Orang tua juga bisa memberikan pemahaman kepada anak untuk tidak terlalu dekat dengan orang-orang yang memiliki gejala tersebut dan meminta anak untuk membari tahu orang tua jika mereka mulai merasakan demam, batuk atau kesulitan bernafas serta gejala-gejala sakit lainnya.

5) Tidak tahu jawabannya? Tidak apa-apa

Tidak ada salahnya mengakui jika ada pertanyaan yang tidak dapat orang tua jawab. Katakanlah, "*Ayah/Ibu tidak tahum kami juga masih belajar*", atau "*Ayah/Ibu tidak tahu, tetapi sepertinya...*". Gunakanlah kesempatan ini untuk belajar sesuatu yang baru bersama anak. Jangan menjadi orang tua yang sok tahu sehingga memberika informasi yang salah pada anak.

e. Pahlawan, bukan perundung

Berikan pengertian pada anak bahwa covid-19 tidak berkaitan dengan penampilan, negara asal atau bahasa seseorang. Sampaikan pada anak bahwa kita bisa mengasihi mereka yang sedang sakit atau petugas medis yang terus bekerja. Coba cari kisah-kisah tentang

orang-orang yang bekerja keras untuk menghentikan wabah dan merawat pasien.

f. Menyortir berita yang beredar

Banyaknya informasi yang beredar yang dapat menambah rasa takut dan gelisah dalam pikiran banyak orang. Oleh karena itu, orang tua sebaiknya merujuk informasi ke sumber-sumber terpercaya.

g. Ingatkan anak bahwa mereka selalu dicintai

Sebagai orang tua, sebaiknya tidak meninggalkan anak dalam keadaan takut, gelisah dan tertekan. Tidak lupa untuk menanyakan keadaan anak. Ketika selesai berbicara dengan anak, cobalah untuk mengukur tingkat ekspresi anak dengan memperhatikan bahasa tubuh mereka, intonasi suara dan pernapasan mereka. Ingatkan anak bahwa kita sebagai orang tua, peduli dan selalu ada jika anak membutuhkan teman bicara. Rangkul mereka dan usahakan anak selalu berda dalam lingkungan hangat, aman dan nyaman.

Selain beberapa alternatif cara di atas, salah satu terapi yang bisa dilakukan oleh keluarga, terutama orang tua ketika di rumah yakni *Filial Teraphy*, karena saat ini banyak keluarga yang telah kehilangan fungsinya sebagai keluarga, dikarenakan kurangnya kehangatan dan keharmonisan di dalam keluarga. Orang tua sibuk dengan pekerjaan dan urusannya sendiri, sedangkan anak hanya diberikan *gadget* untuk menemani mereka sepanjang hari dan menghindari agar anak tidak rewel dan marah. Seharusnya di dalam keluarga sangat penting akan adanya interaksi yang menunjukkan kedekatan emosional, kepedulian dan kasih sayang dari orang tua kepada anak maupun sebaliknya, agar anak merasa dikasihi dan disayangi oleh orang tua. Salah satu hal sederhana yang bisa dilakukan orang tua untuk menjalin hubungan yang baik adalah dengan masuk ke dalam dunia anak. Misalnya dengan bermain bersama anak, hal ini terkesan sederhana, akan tetapi banyak orang tua yang masih sulit menerapkannya.

Pada hakikatnya, bermain dan anak, khususnya anak usia dini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi banyak orang tua yang lupa akan hal itu dan mengabaikannya. Hal ini sangat baik untuk diterapkan orang tua di tengah pandemi covid-19 ini. Perbaikilah hubungan dengan anak, jauh dari *gadget* dan jauh dari barang elektronik lainnya, cukup orang tua dan anak. Cobalah mulai bermain dengan anak. Bermain dapat dijadikan sebuah terapi karena berfokus pada kebutuhan anak untuk mengekspresikan diri mereka melalui penggunaan mainan dalam aktivitas. Selain itu, bermain juga merupakan terapi yang membantu anak untuk mengekspresikan dirinya, melakukan eksplorasi terhadap pikiran dan perasaan dan membuat mereka

memahami lebih baik mengenai hidup mereka. *Dengarkan mereka, libat mereka, beri mereka perhatian. Selamat bersenang-senang tanpa gadget.*

Tidak hanya baik untuk anak-anak, akan tetapi baik juga untuk orang tua jika menerapkan *Filial Therapy* di rumah. *Filial Therapy* merupakan metode terapi bermain yang didasarkan pada prinsip-prinsip terapi yang berpusat pada anak, di mana orang tua secara langsung terlibat. Keterlibatan orang tua dalam hal ini untuk mengatur jadwal bermain dengan anak selama di rumah. Dalam proses permainan, anak didorong untuk mengkomunikasikan kebutuhan, pikiran dan perasaannya kepada orang tua melalui terapi bermain. Orang tua diharapkan menjadi lebih toleran dan menerima anak sebagaimana adanya. Hal ini akan menjadikan anak menjadi orang percaya diri dan mempunyai perasaan untuk menghargai diri mereka sendiri.²⁴

Dalam pendapat lain dikemukakan bahwa *Filial Therapy* adalah program pelatihan orang tua untuk membangun dan meningkatkan hubungan orang tua dan anak melalui kemampuan terapi bermain (Sweeney dan Skurja, 2001). Pendekatan ini untuk terapi orang tua-anak yang mana interaksi bermain orang tua-anak digunakan sebagai perantara dan fokus perlakuan pada hubungan antara orang-tua (Callahan, Stevens & Eyberg, 2010; Diaz & Liberman, 2010; Goodyear-Brown, 2010; Shelby, Avuina & Warnick, 2010). Dalam *Filial Therapy* ini, orang tua dilatih kemampuan dasar terapi bermain berpusat pada anak, termasuk keterampilan mendengar, mengenal kebutuhan emosi anak, batasan aturan terapi, membangun *self-esteem* anak dan mengharuskan sesi bermain setiap minggu dengan anak mereka menggunakan mainan khusus yang telah dipilih.

Mengapa orang tua harus mengikuti *Filial Therapy*? hal ini dikarenakan orang tua yang paling dekat dengan anak dari segi emosional dibandingkan terapis dan orang lain. Selain itu juga, orang tua yang paling berhak untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak secara berkelanjutan, sehingga orang tua bisa memahami pentingnya kemampuan terapi secara efektif dan orang tua juga memberikan pengaruh positif kepada anak sepanjang hidupnya.

Tujuan dari *Filial Therapy* yang utama yakni meningkatkan hubungan orang tua-anak melalui pelatihan orang tua, yang mana kemampuan dasarnya menggunakan permainan yang berpusat pada anak. Selain itu, tujuan dari *Filial Therapy* adalah untuk mengembangkan interaksi orang tua dan anak yang positif dan membantu keluarga mengembangkan kemampuan untuk sukses berdamai dengan masalah-masalah yang akan datang di masa depan tanpa membutuhkan intervensi profesional melalui konseling.

Contoh kegiatan yang bisa dilakukan dalam *Filial Therapy* yakni, *puzzle* anggota badan dan alat-alat dapur, permainan kartu, bermain boneka jari. Langkah-langkah dalam *Filial Therapy* adalah sebagai berikut :

²⁴ Tika Lollyta, "Langkah Terapi Filial Konseling Keluarga" dalam <https://id.scribd.com> diakses pada 05 Juni 2020 pukul 14.25

- a. Konselor dan orang tua bersama-sama merumuskan jenis permainan yang akan dilakukan, jika tidak ada konselor, maka cukup orang tua dan anak saja.
- b. Siapkan alat-alat permainan yang dibutuhkan.
- c. Tempatkan anak dalam kondisi yang baik.
- d. Konselor memberikan simulasi melalui suatu jenis permainan yang menarik perhatian anak, sementara orang tua boleh ikut bergabung atau hanya mengamati terlebih dahulu.
- e. Selanjutnya orang tua dan anak bermain sesuai dengan permainan yang telah disepakati.
- f. Lanjutkan dengan permainan baru, lakukan kembali dari urutan b-e.²⁵

C. Kesimpulan

Anak usia dini merupakan anak yang sedang berkembang segala aspek perkembangan dan pertumbuhan pada dirinya dengan pesat. Orang tua diharapkan mempunyai pengetahuan dan kesadaran untuk menstimulasi dengan baik segala aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Akan tetapi, saat ini banyak orang tua yang kurang memahami akan hal ini. Bahkan ketika anak merasa bosan dan tantrum, orang tua mencari cara aman dan mudah untuk mengatasi hal tersebut, misalnya memberikan *gadget* pada anak. Hal ini sebaliknya akan memberikan efek kecanduan dan beberapa faktor kurang baik yang akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak. Apalagi selama pandemi covid-19 saat ini. Anak hanya berada di dalam rumah bersama orang tua, mengikuti pembelajaran daring dan melakukan semua kegiatan di dalam rumah. Barang tentu, *gadget* menjadi sahabat anak dan sahabat orang tua selama di rumah saja.

Untuk mengurangi kecanduan *gadget* pada anak, terutama selama pandemi covid-19 ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan orang tua, yakni: 1) membatasi penggunaan; 2) beri jadwal; 3) pengawasan; 4) tetapkan wilayah bebas *gadget*; 5) ajarkan anak tentang menahan diri; dan 6) berikan contoh yang baik. Orang tua harus benar-benar ekstra sabar dan telaten dalam menerapkan hal ini dan juga dengan contoh teladan yang baik dari orang tua. Segala sesuatu yang baik haruslah bermula dari orang tua. Pandemi covid-19 ini juga tidak hanya berpengaruh terhadap anak-anak, tetapi juga orang tua. Oleh karena itu, orang tua dapat menerapkan metode *Filial Teraphy* yang dapat diaplikasikan dalam keseharian dan kegiatan bermain orang tua dengan anak, misalnya dalam bermain *puzzle*, permainan kartu dan bermain boneka jari. Suasana di dalam rumah tergantung dari tingkat kreativitas orang tua, jika orang tua kreatif dan dapat membangun suasana menyenangkan, maka sedikit demi sedikit akan bisa mengurangi *gadget* dan dapat membangun kedekatan secara emosional dengan orang tua.

²⁵ *Ibid*,

D. Daftar Pustaka

- , "Parenting in the Age of Digital Technology: A National Survey". Northwestern University: Center on Media and Human Development, 2013
- Agus Purwanto. "Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar". Journal of Education, Psychology and Counseling. Volume 2, Nomor 1 2020
- Channel News Asia. *Indonesia's Health System on the Brink as Coronavirus Looms*. 25 Maret 2020
- Coe, E. dan K. Enomoto. "Mengembalikan Ketahanan: Dampak COVID-19 Terhadap Kesehatan Mental Dan Penggunaan Obat". McKinsey & Company, April 2020
- Dinda Silviana, "Gangguan Kesehatan Mental Anak pada Pandemi COVID-19" dalam <https://tirto.id/pandemi-covid-19-bisa-ganggu-kesehatan-mental-anak-apa-tandanya-eNd7>, diakses pada Rabu, 10 Juni 2020 pukul 20.49
- Idad Suhada. *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini (Raudlatul Athfal)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016
- Jordan Efraim Palar, Franly Oniba dan Wenda Oroh. "Hubungan Peran Keluarga dalam Menghindari Dampak Negatif Penggunaan Gadget pada Anak dengan Perilaku Anak dalam Penggunaan Gadget di Desa Kiawa 2 Barat Kecamatan Kawangkoan Utara". Volume 6 Nomor 2, 2008
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013
- Mansur. *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005
- Marieska Harya Viridhani. "Tips Psikologi Anak Tetap Bisa Kuat Hadapi Pandemi Covid-19", dalam <https://www.jawapos.com/lifestyle/10/06/2020/tips-psikolog-agar-anak-tetap-bisa-kuat-hadapi-pandemi-covid-19/>, diakses pada Rabu, 10 Juni 2020 pukul 20.49
- Mutia Nugraheni. "Pemicu Anak Mudah Bosan dan Cepat Marah" dalam <https://parenting.dream.co.id/ibu-dan-anak/tak-terduga-ini-pemicu-anak-mudah-bosan-dan-cepat-marah-170922u.html>, diakses pada Kamis, 04 Juni 2020 pukul 09.30
- Nyi Mas Diane Wulansari. *Didiklah Anak Sesuai Zaman*. Jakarta: PT. Visimedia Pustaka. 2017
- Republika.co.id. "Hubungan Ibu-Anak Hadapi Stres Social Distancing Covid-19". Kamis, 02 April 2020 17:46 WIB
- Suyadi. *Manajemen PAUD cet.I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011
- Suyadi. *Teori Pembelajaran Anak Usia Dini Dalam Kajian Neurosains*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014
- Tika Lollyta. "Langkah Terapi Filial Konseling Keluarga" dalam <https://id.scribd.com> diakses pada 05 Juni 2020 pukul 14.25
- UNICEF. "COVID-19 dan Anak-anak di Indonesia, Agenda Tindakan untuk Mengatasi Tantangan Sosial Ekonomi". Jakarta: United Nations Children's Fund. 2020
- Wahyu Adityo Prodjo. "Saat Covid-19, Dukungan Psikososial Anak Penting Diberikan" dalam <https://edukasi.kompas.com/read/2020/05/18/192637571/saat-covid-19-dukungan-psikososial-anak-penting-diberikan?page=all>, diakses pada Kamis, 4 Juni 2020 pukul 21.30

Farida Rohaniyah

Yalda. *Menjadi Orang Tua Bijak di Era Digital, Media Moms and Digital Daddy*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2016.

KESETARAAN GENDER BERBASIS *PISUKE* DI DESA PADAMARA DALAM BIDANG PENDIDIKAN: SUDUT PANDANG TEORI PERTENTANGAN KELAS KARL MARX

Erwin Padli

Universitas Islam Negeri Mataram

erwinpadli@uinmataram.ac.id

Abstrak: Upaya penyetaraan posisi laki-laki dengan perempuan dalam ranah pendidikan telah banyak dilakukan, baik oleh negara, lembaga, maupun perseorangan. Bentuknya pun beragam, ada yang melalui peraturan maupun kesepakatan bersama. Dalam usaha penyetaraan berbentuk aturan yang disepakati bersama misalnya memiliki makna tersurat dan tersirat. Hal ini tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Begitu juga dengan tradisi *pisuke* merupakan sebuah aturan bersama yang selama ini tetap dijalankan di Desa Padamara memiliki nilai tersirat yang ternyata merupakan salah satu cara untuk mengangkat derajat perempuan. Dengan menggunakan sudut pandang pertentangan kelas Karl Mark serta pendekatan sejarah peneliti menemukan bahwa tradisi *pisuke* merupakan salah satu bentuk usaha untuk menyetarakan posisi laki-laki dengan perempuan dalam ranah pendidikan.

Kata kunci: **Kesetaraan Gender, *Pisuke*, Pertentangan Kelas**

A. PENDAHULUAN

Kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan pada era sekarang ini sudah bukan menjadi hal yang tabu lagi, walaupun memang kesetaraan tersebut tidak dalam seluruh aspek seperti dalam bidang pendidikan. Akan tetapi hal tersebut merupakan angin segar bagi perkembangan kehidupan kependidikan. Terlebih lagi dengan turut andilnya masyarakat dalam meningkatkan kesetaraan. Peran serta masyarakat dalam memperkecil tingkat kesenjangan pendidikan antara laki-laki dengan perempuan sangat penting, hal ini dikarenakan aspek yang paling besar dalam menciptakan kebiasaan ataupun apa saja berada di lingkungan masyarakat. Jika masyarakat sudah sadar akan pentingnya peran serta perempuan, tentu keinginan bangsa dan negara yang tidak membedakan jenis kelamin dalam menuntut atau melanjutkan jenjang pendidikan akan cepat terlaksana.

Terlepas dari peran serta tersebut, praktiknya dalam kehidupan sehari-hari tidaklah semulus itu, masih terdapat masyarakat dan oknum yang masih belum memahami hal tersebut. Cara berpikir masyarakat Indonesia memang masih belum menerima konsep kesetaraan tersebut, tidak sedikit kemudian yang menganggap bahwa anak perempuan selalu di belakang anak laki-laki. Bahkan masih ada orang tua yang beranggapan bahwa anak perempuan tidak menjadi prioritas utama dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi

ketimbang anak laki-laki. Anak perempuan dianggap sebagai anak yang lemah sehingga kemudian anak perempuan lebih tepat mengambil jurusan atau cocoknya dengan ilmu-ilmu ringan pula seperti ilmu sosial, ekonomi, sastra dan kurang cocok dengan keilmuan yang berbau kekuatan fisik seperti olahraga atau teknik. Hal ini berbanding terbalik dengan anak laki-laki, dan bahkan anak laki-laki diklaim mampu mengambil jurusan apa saja. Lebih lanjut, jumlah perempuan lebih banyak pada sekolah dasar dan semakin berkurang pada sekolah atau perguruan tinggi.¹ Fenomena ketimpangan tersebut disebabkan oleh banyak faktor seperti budaya dan adat istiadat.

Sejalan dengan sistem kekeluargaan masyarakat Sasak yang *patriarkhi*, baik karena faktor fikih maupun adat-istiadat sering kali diklaim oleh para pegiat *gender* sebagai penyebab atau menjadi pintu masuk bagi pengebirian peran dan posisi perempuan dalam ranah publik atau ketidakadilan *gender*. Hal ini dapat kita lihat dari rendahnya partisipasi anak perempuan dalam bidang pendidikan dibandingkan partisipasi anak laki-laki terutama sebelum tahun 1970-an. Anggapan-anggapan dengan posisi perempuan selalu dihadapkan dengan laki-laki. Perempuan sering kali dikaitkan oleh urusan yang berhubungan dengan keluarga dan rumah tangga, sedangkan laki-laki cenderung dikaitkan dengan urusan-urusan lingkungan publik atau urusan di luar rumah. Hal ini selalu berkembang di dalam masyarakat Sasak yang notabenenya merupakan pemeluk agama Islam. Padahal jika kita melihat sejarah kemunculan Islam, Islam sangat menghargai perempuan, tanpa melihat jenis kelamin.

Wacana tentang pengarus-utamaan gender di dunia pendidikan terus di gaung-gaungkan oleh para aktivis gender. Namun hasilnya tetap saja sama, yakni selalu wanita menjadi orang kedua setelah laki-laki di mata masyarakat, jumlah anak didik perempuan selalu tertinggal kedua setelah laki-laki. Padahal menurut hasil penelitian yang dilakukan untuk masyarakat miskin di Bandung, wanita adalah kelompok yang harus menanggung beban kemiskinan dari dampak dari krisis moneter.²

Penduduk perempuan yang jumlahnya mencapai setengah dari seluruh penduduk Indonesia merupakan sumber daya yang cukup besar. Partisipasi aktif dari laki-laki dan perempuan akan lebih mempercepat tujuan Negara terlebih lagi dalam dunia pendidikan. Kurang berperannya salah satu pihak tentu akan mengurangi laju untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut kami paparkan perkiraan komposisi penduduk Indonesia menurut jenis kelamin

¹ Mustofa Kamil Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan. Pdf, dalam http://www.2fprodi.pendidikan_luar_sekolah, diambil pada tanggal 07 Juni 2020, Pukul 20.48 WITA, h. 8

² Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Tamaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar 2011), h. 155.

dan umur tahun 2000-2025 yang dikutip oleh Dr. Riant Nugroho dalam Proyeksi penduduk Indonesia menurut provinsi 1990-2025 Biro Pusat Statistik, Jakarta 1993 sebagai berikut;³

Umur	Jumlah Penduduk									
	2000		2005		2010		2015		2020	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
0-4	11.105	10.717	11.088	10.691	10.802	10.467	10.475	10.082	10.260	9.804
5-9	10.870	10.529	10.969	10.611	10.993	10.620	10.791	10.416	10.419	10.044
10-14	10.751	10.424	10.815	10.487	10.922	10.578	10.953	10.594	10.759	10.395
15-19	11.329	11.000	10.681	10.373	10.755	10.446	10.869	10.545	10.908	10.567
20-24	10.969	10.353	11.218	10.921	10.591	10.314	10.675	10.398	10.799	10.505
25-29	9.208	9.204	10.890	10.259	11.105	10.841	10.499	10.252	10.594	10.347
30-34	7.694	8.438	9.090	9.105	10.721	10.168	11.001	10.761	10.414	10.190
35-39	7.042	7.735	7.376	8.328	8.970	9.004	10.599	10.073	10.893	10.677
40-44	6.457	6.515	6.900	7.607	7.441	8.208	8.829	8.892	10.454	9.965
45-49	5.282	5.058	6.270	6.369	6.718	7.454	7.265	8.060	8.643	8.750
50-54	3.948	3.964	5.054	4.897	6.017	6.181	6.469	7.254	7.021	7.866
55-59	3.241	3.449	3.691	3.781	4.741	4.686	5.668	5.935	6.123	6.989
60-64	2.656	2.902	2.923	3.210	3.344	3.533	4.319	4.399	5.193	5.599
65-69	1.911	2.174	2.269	2.587	2.510	2.878	2.892	3.189	3.762	3.996
70-74	1.338	1.548	1.497	1.800	1.790	2.159	1.999	2.422	2.324	2.707
75+	1.148	1.461	1.421	1.832	1.674	2.224	2.015	2.714	2.343	3.188
	105.480	115.480	112.308	112.865	119.159	119.766	125.325	125.991	130.918	131.659

Dari fakta tersebut, menunjukkan perhatian dalam dari segi pendidikan perlu lebih ditekankan terhadap wanita. Alasannya tentu bukan semata-mata masalah jumlah, namun wanita merupakan ciptaan ilahi yang memiliki fitrah untuk melahirkan anak, yang berarti merupakan asal-muasal dari generasi depan bangsa Indonesia. Bangsa yang dengan wanita terbelakang, akan berpotensi pula untuk melahirkan anak atau penerus bangsa yang terbelakang. Oleh karena itu, paradigma masyarakat sudah saatnya untuk berubah, lebih terbuka, tidak memaknai tugas wanita hanya sebatas rumah tangga saja, namun lebih menyadari bahwa laki-laki dan perempuan dalam dunia pendidikan berada dalam posisi yang sama.

Namun, terlepas dari hal di atas, terjadi hal menarik di desa Padamara. Upaya dalam rangka meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan anak perempuan telah dilaksanakan di desa tersebut. Upaya tersebut mungkin tidak disadari langsung oleh masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan upaya tersebut diolah sedemikian rupa dalam bentuk pemberian *awiq-awiq pisuke* oleh para leluhur mereka dalam proses perkawinan di desa tersebut, yang lambat laun mengubah pola pikir perempuan dan orang tua di desa tersebut terhadap pendidikan khususnya anak perempuan mereka. Hal semacam inilah yang dapat meningkatkan minat dan partisipasi anak perempuan di desa Padamara, dan sebagai upaya dalam rangka menyukseskan cita-cita Negara yang telah tertuang dalam UU SISIDIKNAS No. 20 Tahun 2003 bab IV bagian

³ *Ibid.*, h. 175

ketiga pasal 8 menjelaskan pula tentang peran serta masyarakat dalam keberlangsungan pendidikan yang berbunyi:

“Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.”⁴

Kebanyakan masyarakat desa Padamara tidak melihat esensi dari peran adat *pisuke* yang dari dulu telah ditetapkan. Terkadang sebagian masyarakat saat ini hanya memandang bahwa adat *pisuke* tersebut hanya sebagai ritual desa yang tidak memiliki makna yang sangat mendalam dan tinggi, padahal jika ditelisik lebih mendalam ternyata konsep *awiq-awiq pisuke* ini memiliki makna yang mendalam, yaitu mengangkat kedudukan wanita yang notabene menjadi orang kedua setelah laki-laki, paling tidak, setara dengan laki-laki dalam hal pendidikan dan strata sosial. Hal di atas diperkuat dengan hasil penelitian ini terutama tentang dampak keberadaan *pisuke* di desa Padamara meliputi: Sebagai pemicu dinamika sosial di desa Padamara, sebagai pemicu semangat partisipasi pendidikan anak perempuan, sebagai media transformasi nilai-nilai kesetaraan gender, sebagai bantuan dan penghibur hati orang tua, dan sebagai mediasi konflik *merarik*

Penelitian ini menggunakan metode peneliti kualitatif dengan pendekatan sejarah, oleh karenanya penelitian ini lebih bersifat deskriptif yakni melukiskan variabel atau kondisi yang ada dalam suatu situasi dan kejadian serta peristiwa berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati terkait fenomena atau kejadian masa lalu. Penelitian ini menggunakan analisis induktif, di mana proses penelitian dan pemberian makna terhadap data dan informasi lebih ditonjolkan, ciri utama pendekatan ini adalah bersikap kreatif dan mendalam serta naturalistik.⁵ Terkait dengan pendekatan sejarah yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan pendekatan sejarah pula. Dalam pandangan Kuntowijoyo dan Dudung Abdurrahman terdapat lima tahapan. Pertama pemilihan topik, kedua heuristik, tiga verifikasi data, empat interpretasi dan historiografi.⁶

B. PEMBAHASAN

Desa Padamara dan Budaya *Pisuke*

Seperti yang telah dibahas di atas, bahwa sistem kekeluargaan *patriarkhi* yang dipercayai masyarakat pulau Lombok terutama masyarakat etnis Sasak yang secara demografi tinggal di pedesaan sangat mempertahankan ha

⁴ UU No. 20, *Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional*, (Pdf) h. 4

⁵ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 36.

⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), h. 69. Lihat juga dalam Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 103-120.

tersebut, adat-istiadat dan sistem norma dalam kehidupan kesehariannya sangat dipegang teguh. Masing-masing dusun atau desa mempunyai *awiq-awiq* (aturan dusun atau desa) yang ditetapkan oleh masyarakat, biasanya aturan tersebut merupakan hasil mufakat para tokoh (tokoh agama, adat dan dari unsur pemerintah desa setempat) atau bisa jadi itu merupakan peninggalan dari leluhur. Dalam pandangan dan kepercayaan mereka, jika terdapat masyarakat yang tidak mematuhi aturan atau *awiq-awiq* tersebut akan dikenakan sanksi sesuai kesepakatan, sanksi yang diberikan bisa berbentuk sanksi materi maupun sanksi moral. Adapun pengertian *awiq-awiq* adalah aturan tidak tertulis (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Karena istilah Adat yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi kebiasaan maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan.⁷

Begitu pula dalam melaksanakan sebuah pernikahan, masyarakat Lombok atau biasa disebut dengan masyarakat Sasak memiliki berbagai macam ritual pernikahan yang harus mereka jalani, baik pra-pernikahan ataupun pasca-pernikahan. Salah satu ritual upacara pernikahan itu adalah *pisuke*, tradisi ini dilakukan sebelum terjadinya akad nikah. Hal semacam ini juga menjadi prosesi yang tetap dilaksanakan di Desa Padamara.

Desa Padamara merupakan salah satu desa di kecamatan Sukamulia kabupaten Lombok Timur⁸ yang hingga saat ini masih memegang teguh adat istiadat (*awiq-awiq* desa) yang ada pada desa tersebut. Desa Padamara dalam lintasan sejarahnya dikenal sebagai daerah adat, di mana hampir seluruh aspek kehidupan masyarakatnya memiliki nilai-nilai adat yang tidak hanya berlaku bagi masyarakat desa Padamara melainkan juga dihormati oleh masyarakat Sasak lainnya di luar desa Padamara, terutama desa-desa sekitarnya. Sebab, *awiq-awiq* adat yang ada tidak bertentangan dengan nilai agama sekaligus tujuan dari pembangunan Nasional.⁹ Begitu pula dengan konsep *pisuke* yang tetap dilestarikan oleh masyarakat desa Padamara. Karena menurut masyarakat di sana tidak ada adat yang bertentangan dengan agama, karena nilai-nilai yang terdapat dalam adat tersebut justru lahir sebagai hasil

⁷ KBBI Online, Pengertian adat istiadat, dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum adat](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat), di ambil pada 9 Juni 2020, pukul 13.44 WITA

⁸ Profil desa Padamara 2020, *Dokumentasi*, (1 Juni 2020), h. 2

⁹ Wawancara dengan L. Patre Wijaya, salah seorang tokoh adat dan tokoh masyarakat desa Padamara, 1 Juni 2020.

pengembangan terhadap ajaran Islam.¹⁰ Bagi masyarakat desa Padamara, adat istiadat adalah norma-norma yang dijunjung tinggi dalam kehidupan. Adat juga menanamkan kepercayaan yang teguh akan kekuatan Allah SWT menciptakan manusia dengan penuh kesempurnaan. Adat menciptakan manusia dalam hidup dan kehidupannya selalu menunjukkan pada sikap dan sifat yang baik, positif serta dilandasi dengan akhlakul karimah.¹¹

Pisuke adalah sejumlah pemberian dari keluarga calon mempelai laki-laki terhadap keluarga mempelai wanita. Pemberian yang dimaksud bisa berbentuk uang maupun benda ketika utusan dari mempelai laki-laki akan meminta perempuan itu pada walinya¹². Jumlah atau besaran *pisuke* biasanya ditentukan ketika prosesi pra-nikah yang biasa disebut dengan *sejati-selabar*. Sebagian masyarakat Lombok, *pisuke* ini merupakan pemberian hal yang harus diberikan sebelum akad pernikahan dilangsungkan, biasanya jika tidak ada kesepakatan yang pasti tentang jumlah pemberian *pisuke* yang harus diberikan, maka bisa jadi pernikahan akan tertunda pelaksanaannya, bahkan bisa-bisa pernikahan tidak akan terjadi jika keluarga laki-laki menolak membayar *pisuke* sesuai dengan permintaan keluarga perempuan.¹³ Pada biasanya jumlah *pisuke* yang harus dibayar oleh pihak laki-laki disesuaikan dengan tingkat pendidikan perempuan yang hendak dijadikan mempelai wanita. Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan maka jumlah *pisuke* yang harus dibayarkan semakin tinggi pula. Tidak jarang persoalan ini akan berakhir di meja hijau, karena wali perempuan biasanya tidak bersedia menikahkan anaknya jika *pisuke* yang diminta tidak dipenuhi.¹⁴ Tradisi seperti ini biasanya banyak terjadi di daerah Lombok dan khususnya di desa Padamara kecamatan Sukamulia kabupaten Lombok Timur.¹⁵

Marx Berbasis Kesetaraan *Gender* dalam *Pisuke*.

Karl Marx merupakan tokoh sosial yang lahir pada 5 Mei 1818 di kota Trier atau biasa disebut dengan Traves, sebuah daerah yang termasuk kawasan Rheiland Jerman (Prusia). Orang tua Marx merupakan keturunan tokoh agama Yahudi. Ayahnya, Heinrich Marx termasuk golongan menengah dan menjadi pengacara ternama di Traves. Sedangkan ibunya adalah putri dari

¹⁰ Erwin Padli, Peran *Awig-awig Pisuke* dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Bidang Pendidikan di Desa Padamara Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur, *Skripsi FITK IAIN Mataram*, tahun 2015, tidak dipublikasi, h. 4

¹¹ Hilman Hadikusumo, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Grasindo, 1992), h. 30.

¹² Dewi Nurwiriya Sasih, Studi Komparatif Tradisi *Pisuke* dan Fiqih Munakahat, *Skripsi*, UIN Malang 200, 7 h. 40.

¹³ Erwin Padli, Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam *Awig-awig Pisuke*, *el-Hikmah* (13) 2, 2019, h. 188.

¹⁴ Wawancara dengan Bq. Linggar Weni, salah seorang aparat Desa Padamara, 1 Juni 2020

¹⁵ Erwin Padli, Tradisi..., h. 18

seorang pendeta yang berasal dari Belanda. Ketika menginjakkan usai yang ke-17 tahun, Marx sudah menamatkan sekolah menengah di tanah kelahirannya Treves, tepatnya tahun 1835. Kemudian Marx sempat melanjutkan menuntut ilmu sebentar di Universitas Bonn yang dilanjutkan di Universitas Berlin selama lima tahun. Pada masa belajar di universitas-universitas inilah kemudian Marx mulai berkenalan dengan filsafat Hegel dan terlibat dalam aktivitas intelektual dengan kelompok filosof sayap-kiri yang dikenal sebagai “Hegelian muda,” yakni kelompok diskusi yang membahas filsafat Hegel. Sudah barang tentu anggota kelompok ini rutin mengkaji ajaran-ajaran atau konsep pemikiran Hegel yang pada waktu itu menjadi dogma dan sumber ideologi resmi di Jerman. Akhirnya, pada usia 23 tahun Karl Marx memperoleh gelar doktor dalam ilmu filsafat dengan judul disertasinya *The Difference Between the Natural Philosophy of Democritus and Natural Philosophy of Epicurus* (Perbedaan antara Filsafat alam Demokritos dan Filsafat alam Epikuros).¹⁶

Dalam pandangan Mark bahwa sejarah masyarakat di bumi adalah sejarah pertentangan kelas antara si merdeka dengan budak, bangsawan dengan rakyat jelata, majikan dengan buruh singkat kata antar penindas dengan tertindas.¹⁷ Sejak manusia lahir mereka bukan di motivasi oleh ide besar seperti mengejar politik, ilmu pengetahuan, seni dan agama, namun oleh kebutuhan materi untuk mempertahankan hidup seperti makan, minum, tempat tinggal dan pakaian. Pada zaman klasik dan pertengahan peradaban manusia didominasi oleh pertanian, sedangkan di zaman modern muncul kapitalisme yaitu model baru perdagangan dan pabrik-pabrik yang mengakibatkan munculnya kaum borjuis dan proletariat, pada intinya pola sama namun yang membedakan adalah pola konflik yang terjadi. Kapitalisme memberi keuntungan bagi kaum borjuis/ *middle class* sedangkan bagi kaum proletariat tidak mendapatkan apa-apa, mereka hanya menjual tenaga bagi pemilik perusahaan untuk mendapat upah bagi penyangga kehidupannya. Dari sinilah kemudian muncul konflik, diakibatkannya penderitaan kaum proletariat. Pemikiran Mark memicu kaum proletariat untuk melakukan revolusi yaitu dengan menghancurkan seluruh sistem sosial-ekonomi yang selama ini menindasnya, namun kaum borjuis tidak mau menyerahkan kekayaannya.¹⁸

Lebih jauh dalam pandangan Marx, kelas sosial adalah sebuah

¹⁶ Andi Muawiyah Ramly, *Peta Pemikiran Karl Marx. Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 34.

¹⁷ Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion*, edisi terj. oleh Inyak Ridwan, cet. Ke-2, (Yogyakarta: IRCiSod, 2012), hlm. 179-182.

¹⁸ Poloma, Margaret, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 258.

penggolongan manusia dalam bentuk penggolongannya yang tidak sederajat dengan kelompok sosial. Jika kelompok sosial lebih menekankan pada pengelompokan manusia atas dasar perbedaan yang bersifat horizontal, tetapi dalam kelas sosial manusia dikelompokkan berdasarkan perbedaan kualifikasi kolektif secara vertikal. Pengkualifikasian sosial secara vertikal, manusia dikelompokkan menurut kelas masing-masing seperti kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah. Permasalahan yang terjadi di kehidupan sosial bermasyarakat ini adalah mengapa selalu terdapat di dalam pengelompokan kelas-kelas sosial.¹⁹ Dari kelas-kelas sosial ini kemudian muncul konflik, diakibatkannya penderitaan kaum proletariat. Pemikiran Mark memicu kaum proletar untuk melakukan revolusi yaitu dengan menghancurkan seluruh sistem sosial-ekonomi yang selama ini menindaknya, namun kaum borjuis tidak mau menyerahkan kekayaannya.²⁰ Dalam kasus pendidikan yang terjadi di Indonesia dan secara khususnya di Desa Padamara dapat diasumsikan bahwa kelas sosial ini kemudian mencuat kepermukaan antara kelas sosial laki-laki dengan perempuan dengan sengaja ataupun tidak kelas sosial perempuan mencari jalan keluar untuk melawan perbedaan yang terjadi salah satunya melalui tradisi *pisuke*.

Terkait dengan pemikiran Mark tersebut, maka pemahaman masyarakat tentang konsep *pisuke* sebagian besar hanya dalam pemaknaan materi semata, melainkan *pisuke* tidak ansih hanya sebatas materi pemberian pihak laki-laki semata. Dalam pemahaman peneliti, *pisuke* menjadi sebuah cara yang dilakukan oleh kaum perempuan desa padamara untuk melawan hegemoni keterkungkungan mereka dari pihak laki-laki, serta wahana untuk meningkatkan derajatnya agar tidak melulu menjadi orang kedua setelah laki-laki. Oleh karenanya menurut penulis, kebudayaan *pisuke* ini bisa di analisis menggunakan terori marxisme tentang perlawanan kelas. Kelas yang dimaksud di sini adalah perbedaan posisi atau kelas laki-laki dengan perempuan dimata masyarakat desa Padamara. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian pemberian *pisuke* disesuaikan dengan tingkat pendidikan perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan maka jumlah *pisuke* yang harus dibayarkan semakin tinggi pula.²¹

Lebih lanjut, bukankah salah satu tujuan nasional yang selaras dengan adanya *amiq-amiq* tersebut adalah dalam rangka meningkatkan angka partisipasi

¹⁹ George Ritzer and Douglass J. Goodman, *Teori Sosiologi*, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2011), h. 153

²⁰ Margaret Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 258.

²¹ Wawancara dengan Bq. Linggarweni, salah seorang aparaturnya Desa Padamara, 1 Juni 2020

pendidikan anak perempuan di desa Padamara. Jika menilik ke belakang era 60-an, keberpihakan orang tua terhadap pendidikan anak perempuan jauh lebih kurang dibandingkan dengan keberpihakan kepada anak laki-laki. Secara umum, Masyarakat Sasak hingga tahun 1960-an masih menyepelekan partisipasi anak perempuan terhadap pendidikan formal, terutama di pedesaan.²² Kondisi sosial masyarakat Sasak yang demikian ternyata hampir sama dengan kondisi umum masyarakat Melayu sebagaimana ditunjukkan melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI pada era tahun 90-an awal di mana para jejaka dan gadis Melayu sudah menikah pada usia rata-rata antara 16 sampai 17 tahun, bahkan di beberapa daerah tertentu seperti pada masyarakat Melayu tradisional rata-rata menikahnya pada usia 13 tahun untuk perempuan dan 15 tahun untuk laki-laki”.²³

Hasil survei yang telah dilakukan di desa Padamara, menerangkan bahwa tingkat partisipasi anak perempuan kisaran tahun 1980-1990-an partisipasi pendidikan anak Perempuan masih terbilang cukup, namun jenjang pendidikan pada masa-masa ini hanya sampai tingkatan SMA sederajat, dan masih di dominasi oleh pihak laki-laki. Sedangkan Tahun 2000-sekarang tingkat pendidikan anak perempuan sudah setara dengan laki-laki, ada yang sudah berjenjang sampa Strata 2 (S2) dan sudah banyak anak perempuan yang melanjutkan pendidikan di luar daerah.²⁴

Rendahnya angka partisipasi anak perempuan dibandingkan angka partisipasi anak laki-laki di desa Padamara terutama sebelum tahun 1970-an, kemudian pada saat ini justru berubah total, yakni mencapai angka setara dan bahkan lebih tinggi angka partisipasi anak perempuan dibandingkan partisipasi anak laki-laki pada semua jenjang pendidikan adalah hal yang fenomenal dan menarik untuk ditelisik lebih dalam terutama tentang peran adat yang hingga saat ini masih kuat dipertahankan oleh masyarakat Sasak, terlebih lagi konsep *pisuke* yang selalu eksis sampai saat ini.

Disadari atau tidak dalam perjalanannya *pisuke* memiliki dampak yang cukup berpengaruh bagi golongan perempuan di desa Padamara, salah satu dampaknya adalah dalam dunia pendidikan, seperti yang di utarakan oleh salah seorang warga desa Padamara khususnya perempuan, eksistensi *pisuke* juga cukup berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pendidikan anak perempuan, hal ini dikarenakan jika tingkat pendidikan seorang anak

²² Erwin Padli “Tradisi...”, h. 39

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, “Usia Pernikahan Jejaka di Indonesia pada Tahun 1995, dalam <http://www.datastatistik-indonesia.com/portal/index.php?option=> diambil tanggal 0 Juni 2015, pukul 23.05 WITA

²⁴ Profil desa Padamara 2014, *Dokumentasi* (11 September, 2014) h. 4

perempuan tinggi, maka jumlah *pisuke* yang hendak diberikan oleh pihak laki-laki akan menyesuaikan dengan hal tersebut. Lalu yang menjadi alasan utama adalah rasa kebanggaan tersendiri bagi pihak perempuan jika *pisuke* yang dibayarkan pihak laki-laki karena pandangan masyarakat padamara jika *pisuke* yang dibayarkan pihak laki-laki berpengaruh terhadap pandangan terhadap strata sosial pihak perempuan.²⁵

Hal ini dikuatkan dengan kenyataan yang ada, dari tahun ke tahun, jumlah tingkat pertumbuhan partisipasi pendidikan anak perempuan dari tahun 1980-an sampai 2000-an di desa Padamara selalu bertumbuh atau dengan kata lain adanya sebuah peningkatan. Adapun gambaran tingkat partisipasi anak perempuan dapat kami gambarkan sebagai berikut;²⁶ Tahun 1980-1990-an partisipasi pendidikan anak Perempuan masih terbilang cukup, namun jenjang pendidikan pada masa-masa ini hanya sampai tingkatan SMA sederajat, dan masih di dominasi oleh pihak laki-laki. Tahun 2000-sekarang tingkat pendidikan anak perempuan sudah setara dengan laki-laki, ada yang sudah berjenjang sampa Strata 2 (S2) dan sudah banyak anak perempuan yang melanjutkan pendidikan di luar daerah.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang warga desa Padamara (perempuan) dapat diambil sebuah makna pendidikan merupakan sebuah jalan untuk meningkatkan strata sosial dalam masyarakat, di mana *pisuke* memainkan peran terhadap motivasi perempuan untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. Hal ini karena berubahnya pola pikir masyarakat desa Padamara yang mulai memandang seseorang dengan kapasitas dirinya, tidak *an-sich* hanya melalui kebangsawanan semata. Oleh karena itu, pendidikan bagi masyarakat khususnya perempuan sangat penting baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat. Hal inilah yang menjadikan perempuan desa Padamara semakin giat dalam meningkatkan jenjang pendidikan mereka. Jika pendidikan yang ditempuh mereka semakin tinggi, maka *pisuke* yang harus diberikan oleh pihak laki-laki semakin tinggi pula. Dengan begitu, sudah barang tentu strata sosial perempuan menjadi meningkat juga.

Selain itu, dalam hal kesetaraan gender ternyata *pisuke* memainkan peran. Kesetaraan *gender* yang dimaksud dalam hal ini adalah, ketika pihak laki-laki memberikan *pisuke* dalam jumlah yang telah ditentukan atau di sepakati terlebih lagi dalam jumlah yang banyak, maka laki-laki tersebut tidak akan mudah untuk menceraikan atau menjatuhkan talak terhadap istrinya, dengan pertimbangan bahwasanya dia sudah menghabiskan banyak biaya, terutama

²⁵ Wawancara dengan Bq. Linggarweni, salah seorang aparaturnya Desa Padamara, 1 Juni 2020

²⁶ Profil desa Padamara 2014, *Dokumentasi* (11 September, 2014) h. 4
60 Qawwam Vol. 14, No. 1 (2020)

pemberian *pisuke*.²⁷ Dari penjelasan tersebut, penulis memberikan kesimpulan bahwa dengan tingginya *pisuke* yang diberikan akan berpengaruh terhadap rasa ketidak sewenag-wenangan laki-laki terhadap perempuan. Hal ini disebabkan karena dengan telah diberikannya *pisuke* dalam jumlah yang besar, maka rasa untuk menyia-nyiakan perempuan akan cenderung lebih berkurang, dengan asumsi bahwa *pisuke* merupakan pemberian dalam konteks sebagai pemberian untuk memutuskan tanggung jawab orang tua pihak perempuan. Oleh karena itu, *pisuke* ini merupakan salah satu wahana perlawanan pihak perempuan untuk meningkatkan strata sosial mereka dalam masyarakat desa Padamara. Hal ini dikarenakan jumlah pemberian *pisuke* akan andil terhadap pandangan masyarakat terkait status sosial perempuan, bukan semata golongan ningratnya saja.

Lebih jauh, Perkembangan sebuah masyarakat sangat tergantung dari strata sosial yang dibangun. Ketika, strata sosial dibangun atas dasar sesuatu yang *given* (didapatkan secara turun-temurun) tanpa usaha, maka sistem sosialnya bersifat feodal. Namun, ketika strata sosial dibangun atas dasar hal-hal bersifat rasional dan penuh usaha individu, maka sistem sosialnya bersifat dinamis dan demokratis. Masyarakat Padamara yang dikenal sebagai desa adat sering sekali diidentikkan dengan masyarakat feodal. Anggapan banyak pihak terhadap kefeodalan masyarakat Padamara disebabkan oleh kuatnya adat dengan kelompok bangsawan sebagai penentu kebijakan adatnya. Namun, dalam perkembangan lebih lanjut, adat tidak hanya mengatur komunitas antar bangsawan di Padamara, melainkan mengikat semua yang ada di desa Padamara, di mana ada kelompok bangsawan dan non bangsawan. Namun anggapan pihak luar tentang feodalisme bangsawan Padamara terbantahkan dengan pernyataan kepala desa Padamara di atas dengan adanya *anwig-anwig* atau aturan tak tertulis berupa penetapan jenjang pendidikan anak perempuan sebagai standar baru dalam penentuan besaran *pisuke*-nya.

KESIMPULAN

Jika dilihat dari kasus tersebut, peneliti merasa bahwa perlawanan dari kelas yang dikemukakan oleh Mark belum sepenuhnya benar. Hal ini atas dasar hasil observasi, pengamatan serta asumsi peneliti dari contoh kasus kebudayaan di atas. Jika dalam teori disebutkan setiap perlawanan yang dilakukan dimulai oleh pihak yang tertindas semata atau kelas yang dimarjinalkan, maka dalam kasus tersebut penulis merasa perlawanan yang dilakukan dalam rangka peningkatan derajat perempuan tidak *an-sich* dimotori oleh kaum perempuan semata, melainkan dari kesepakatan bersama dari

²⁷ Erwin Padli “Tradisi...”, h. 78

masyarakat desa Padamara.

Seperti yang diuraikan oleh Marx, bahwa pelaku-pelaku utama dalam perubahan sosial bukanlah individu-individu tertentu, melainkan kelas-kelas sosial. Ia memberitahukan kepada kita secara mendetail bahwa kelas-kelas itu tidak dibedakan berdasarkan pendapatan yang mereka hasilkan. Sekalipun anggota-anggota dari kelas yang berbeda secara khas akan mendapatkan penghasilan yang tidak sama, mereka tidak harus dimasukkan ke dalam kelas-kelas yang berbeda, dan sekalipun mereka bisa dimasukkan ke dalam kelas-kelas tersendiri, penggolongan itu tidak mesti dipahami bahwa mereka termasuk dalam kelas-kelas yang berbeda. Marx juga menolak gagasan bahwa kelas-kelas dapat dibedakan berdasarkan pekerjaan dari anggota-anggotanya yaitu dengan melihat hakikat spesifik kerja yang mereka lakukan. Konteks kerja, bukan kerja itu sendiri, merupakan parameter suatu kelas. Oleh karena itu, jika melihat dari kasus di atas, maka asumsi penulis adalah tidak selamanya perlawanan yang dilakukan oleh suatu kelas harus bersumber dari kelas itu sendiri. Selain itu, perempuan desa Padamara hanya sebatas kebetulan saja mengambil kesempatan dari tradisi tersebut, bukan semata-mata diciptakan oleh golongan perempuan yang menjadi golongan nomor dua atau dimarjinalkan.

Daftar Pustaka

- Coon, Dennis dan Mitterer, John O. *Introduction to Psychology Gateways to Mind and Behaviour Eleventh Editio*. (United States of America: Thomson Higher Education. 2007)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, "Usia Pernikahan Jejak di Indonesia pada Tahun 1995, dalam [http //www. datastatistik - indonesia. com/ portal/ index.php?option](http://www.datastatistik-indonesia.com/portal/index.php?option), diambil tanggal 6 Juni 2020, pukul 23.05 WITA.
- Dudung Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. (Yogyakarta: Ombak, 2011).
- Goodman, George Ritzer and Douglass J. *Teori Sosiologi*. (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2011).
- Hadikusumo, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. (Bandung: Grasindo, 1992).
- Kamil, Mustofa. Pengarustamaan Gender dalam Pendidikan., dalam *Prodi.pendidikan_luar_sekolah*, diambil pada tanggal 07 Juni 2020, Pukul 20.48 WITA.
- KBBI Online , Pengertian adat istiadat, dalam [http: //id.wikipedia. org/wiki /Hukum adat](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat), di ambil pada 6 Juni 2020, pukul 13.44 WITA
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013).
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).
- Nugroho, Rianti. *Gender dan Strategi Pengarus-Tamaannya di Indonesia*. 62 Qawwam Vol. 14, No. 1 (2020)

- (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar 2011).
- Padli, Erwin. Peran *Awiq-awiq Pisuke* dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Bidang Pendidikan di Desa Padamara Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. *Skripsi*. (Fakultas FITK IAIN Mataram, tahun 2015)
- Padli, Erwin. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Awiq-awiq Pisuke. *el-Hikmah* (13) 2, 2019.
- Pals, Daniel L. *Seven Theories of Religion*, edisi trj. oleh Inyak Ridwan, cet. Ke-2, (Yogyakarta: IRCiSod, 2012), hlm. 179-182.
- Poloma, Margaret. *Sosiologi Kontemporer*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Profil desa Padamara 2020.
- Ramly, Andi Muawiyah. *Peta Pemikiran Karl Marx. Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis*, (Yogyakarta: LKiS, 2000).
- Sasih, Dewi Nurwiriya. Studi Komparatif Tradisi Pisuke dan Fiqih Munakahat. *Skripsi*. UIN Malang 2007.
- UU No. 20, *Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional*. (Pdf).
- Wawancara dengan Bq. Linggar Weni, salah seorang aparatur Desa Padamara.
- Wawancara dengan L. Patre Wijaya, salah seorang tokoh adat dan tokoh masyarakat desa Padamara.

PENGUATAN PERAN PEREMPUAN SEBAGAI “*CADIAK PANDAI*” DAN “*BUNDO KANDUANG*” DALAM PEMBERDAYAAN KEGIATAN DIDIKAN SUBUH

Irwandi

IAIN Batusangkar

irwandi@iainbatusangkar.ac.id

Abstrak: keterlibatan perempuan dalam kegiatan didikan subuh sangat signifikan karena mereka berada pada posisi “*cadiak pandai*” dan “*Budo Kanduang*” dalam tatanan kehidupan sosial keagamaan, termasuk kegiatan didikan subuh yang dilaksanakan di setiap masjid/ mushalla/ surau yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Untuk melihat peran dan fungsi perempuan sebagai “*cadiak pandai*” dan “*Bundo Kanduang*” di Minangkabau dalam kegiatan didikan subuh maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Tanah Datar. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa peran perempuan dalam kegiatan didikan subuh ini sebagai berikut; Perempuan sebagai anggota “*cadiak pandai*”, Perempuan sebagai “*Bundo Kanduang*” dalam Kegiatan Didikan Subuh dan perempuan sebagai “*bundo Kanduang organisasi*”

[**Abstract:** *the involvement of women in dawn education activities is very significant because they are in the position of "smart cadiak" and "Budo Kanduang" in the social and religious life structure, including dawn education activities carried out in every mosque / mushalla / surau in Tanah Datar District. To see the role and function of women as "smart cadiak" and "Bundo Kanduang" in Minangkabau in dawn training activities, the research method used is a qualitative research method with a descriptive approach with data collection techniques by interviewing, observing and documenting. The location of this research is in Tanah Datar District. The results of the study found that the role of women in these early morning education activities was as follows; Women as members of the "smart cadiak", Women as "Bundo Kanduang" in the Early Dawn Education Activities and women as "Bunduang Kanduang organizations"*]

Keywords: *Women, empowerment, custom, Education*

A. Pendahuluan

Minangkabau dalam tatanan budaya dan Sumatera Barat dalam tatanan Pemerintahan, semenjak dahulu terkenal sosio kultural yang kental dengan kehidupan beragama hal ini karena didasari oleh falsafah “adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah”, falsafah ini menuntut peran serta dari berbagai pihak baik pihak pemerintah, alim ulama dan tokoh adat, hal ini sesuai dengan hasil yang diungkapkan oleh Ahmad

Kosasih mengatakan Nagari di Minangkabau selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan terendah dalam wilayah Republik Indonesia juga merupakan basis penanaman dan pelestarian nilai-nilai adat dan syarak. Kepemimpinan Nagari tidak hanya dilaksanakan oleh Wali Nagari dan perangkat-perangkatnya sebagai pimpinan formal tapi juga oleh forum Tigo Tungku Sajarangan (*Niniak Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai*) ditambah dengan unsur-unsur *Bundo Kanduang* sebagai pimpinan sosial, Masing-masing unsur harus saling bekerjasama dan bahu membahu sesuai fungsinya untuk mewujudkan cita-cita menuju kehidupan masyarakat Nagari yang makmur, sejahtera, aman, damai dan sentosa¹. Fungsi-fungsi tersebut akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila masing-masing unsur memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai adat dan syari'at Islam seperti tertuang dalam ungkapan “Adat Basandi Syarak- Syarak Basandi Kitabullah. dari daerah ini banyak lahir tokoh-tokoh Nasional dan berkaliber Internasional, baik yang berjuang pada masa sebelum kemerdekaan, dan sesudah kemerdekaan. Perjalanan kehidupan mereka banyak didasari oleh kehidupan masa kecil dan remaja yang di besarkan di suatu lembaga non formal yang disebut dengan “surau”. Secara umum ada dua kegiatan yang mereka pelajari di lembaga ini diantaranya adalah belajar Al-quran dan bersilat,

untuk menumbuh kembangkan kegiatan keagamaan di Minangkabau baik yang dilaksanakan dalam lingkup formal dan non-formal keterlibatan perempuan dalam penelitian ini ditempatkan pada posisi *cadiak pandai*, pengertian *cadiak pandai* menurut Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7. Tahun 2018 tentang Nagari adalah anggota suku/kaum atau anggota masyarakat yang ahli dalam bidang ilmu umum berbagai disiplin ilmu atau berilmu pengetahuan luas.² Artinya perempuan di Minangkabau yang mempunyai pengetahuan dibidang keagamaan dapat di katagorikan *cadiak pandai*, karena itu mereka telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam

¹ Ahmad Kosasi. “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari”, Jurnal Humanus. 2013, hlm. 107-119.

² Peraturan Daerah Sumatera Barat No.7 tahun 2018 Tentang Nagari (lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat No.7 tahun 2018)

kegiatan keagamaan diataranya adalah kegiatan “didikan subuh” yang menempatkan kaum perempuan sebagai orang yang

berilmu tentang agama. Kegiatan didikan subuh ini juga merupakan sebagai bentuk pembinaan perempuan terhadap anak yang dilaksanakan di masjid/mushall/surau.

Data yang diperoleh dari kepala bagian Kesejahteraan Rakyat Sekreteriat Daerah Kabupaten Tanah Datar menunjukkan jumlah *bundo kanduang* yang terlibat dalam kegiatan didikan subuh di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 1.115 orang dari jumlah 2.612. orang guru Pembina didikan subuh. Dari data tersebut memperlihatkan bahwa perempuan mempunyai fungsi yang sama dengan laki-laki khususnya dalam ibadah sosial kemasyarakatan.

Data Keterlibatan perempuan dalam kegiatan didikan subuh di Kabupaten Tanah Datar, akan mempertegas tujuan penelitian yaitu bagaimana peran perempuan *sebagai “Cadiak Pandai” dan “Bundo Kanduang”* dalam pemberdayaan kegiatan didikan subuh di Kabupaten Tanah Datar. Melihat keterlibatan peran perempuan tersebut maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi dari literatur. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar. Ada beberapa penelitian tentang didikan subuh ini diantaranya, penelitian yang dilaksanakan oleh Santoso dan Raja Jeldi yang mengemukakan bahwa Pengelolaan program Didikan Subuh dalam rangka pengembangan karakter beribadah anak di Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Kota Pekanbaru telah berjalan cukup efektif baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek baik internal manajemen, lingkungan terdekat di luar panti, dan komitmen pengurus/pengelola panti. (2) Program Didikan Subuh secara signifikan memiliki pengaruh dalam pembentukan karakter kemandirian beribadah anak panti. Kemandirian tersebut tumbuh melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah pengkondisian yang bersifat kedisiplinan, kedua terbentuknya kebiasaan dan ketiga terbangunnya kesadaran yang bersifat mandiri. (3) Bentuk karakter kemandirian beribadah anak di Panti Asuhan

Putra Muhammadiyah Kota Pekanbaru ditunjukkan dengan aktivitas beribadah anak yang didasari oleh nilai-nilai kesadaran, tanggung jawab, disiplin dan motivasi³.

Penelitian lain yang melibatkan perempuan dalam kegiatan keagamaan terutama dalam bidang pandai baca tulis Al-quran adalah yang penelitian yang dilaksanakan oleh Wilda Wisnofa yang mengatakan bahwa guru perempuan dalam pembentukan karakter anak dapat dikategorikan baik hal ini ditunjukkan guru perempuan berperan sebagai pengajar dalam memperbaiki bacaan Al-Quran dan Iqra dengan baik, benar dan fasih, yang dilakukan dengan cara guru mengaji terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh anak didik. Sebagai pendidik yaitu guru menanamkan sikap saling menghargai, guru memberikan hukuman yang mendidik, guru mencontohkan adab yang mengikuti sunnah Rasul, guru memberi motivasi dan guru memberi peluang kepada anak didik untuk tampil saat didikan subuh. Sebagai teladan guru menanamkan jiwa disiplin, serta guru menanamkan jiwa taat dalam beribadah⁴.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di atas tentang fungsi dan kedudukan perempuan dalam pendidikan, maka penelitian yang dilakukan ini secara substansi berbeda dalam kajian keilmiah, pada penelitian ini bertitik tolak dari penguatan peran perempuan dalam kegiatan didikan subuh di Kab. Tanah Datar.

Kegiatan Subuh di Sumatera Barat telah lama dilaksanakan (diperkirakan dimulai tahun 1960-an) dan sudah menyebar keseluruh Kab/Kota di Sumatera Barat. Perkembangan kegiatan didikan subuh khusus di Kabupaten Tanah Datar ditandai dengan pembentukan lembaga didikan subuh yang disingkat dengan LDS. Kedudukan Lembaga diperkuat dengan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pandai Baca Tulis Al-quran Bagi Peserta Didik dan Calon

³ Santoso, Raja Junaidi, "peran program didikan subuh dalam pengembangan karakter kemandirian beribadah anak", Jurnal Islamika Vol. 2, No. 2 (2019), hlm 120-131,

⁴ Wilda Wisnofa Anggraini, Isnarmi, "Guru Perempuan Dalam Pembentukan Karakter Anak (Studi TPA/MDA Masjid Taqwa Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging)", Journal of Civic Education Volume 1 No. 3 2018 hal. 261-272

Penganten yang pada salah satu pasalnya mewajibkan guru Taman Pendidikan Alquran (TPA) dan Peserta didik untuk mengikuti Kegiatan Didikan Subuh di Masjid/mushalla/Surau, dan penyelenggaraan kegiatan didikan subuh ini juga di cantumkan dalam Pasal 35 ayat 2 Perda Kab. Tanah Datar Nomor 1 tahun Tentang pendidikan.

Kegiatan didikan subuh merupakan salah satu bentuk kegiatan yang di laksanakan oleh para santri Taman pendidikan Alquran (TPA) pada waktu subuh hari. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan lebih kurang 1 kali dalam seminggu yaitu pada hari minggu, pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari sebelum sholat subuh sampai pada terbitnya matahari (antara 1 s/d 2 jam pelaksanaan kegiatan). Dalam kegiatan ini akan di jarkan kemampuan peserta atau santri untuk mampu mengelola waktu sebelum dan sesudah sholat subuh berjamaah. Pengelolaan kegiatan ini di Kabupaten Tanah Datar di Sebut dengan kegiatan didikan subuh “pola santri mandiri”, artinya setiap tahapan kegiatan sepenuhnya diserahkan sepenuhnya kepada para santri dan di awasi secara langsung oleh guru (ustadz/ustazah) beserta orang tua/wali para santri.

Program kegiatan didikan subuh diantaranya membahas tentang Aqidah, Ibadah, dan Syariah Dalam kegiatan didikan subuh yang dilaksnakan di setiap masjid/mushalla/surau di Kabupaten Tanah Datar secara manajemen pengelolaan berbeda dengan pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus didikan subuh. Didikan subuh yang dilaksnakan satu kali dalam seminggu pada hakekatnya tidak sama dengan kegiatan di Taman Pendidikan Alquran, kegiatan didikan subuh yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat subuh wajib di hadiri oleh orang tua/wali santri dengan peserta didikan subuh berasal dari santri TPA dimaksud juga dari anak-anak yang berada disekitar masjid/mushalla/surau.

Perhatian pemerintah daerah Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tentang kegiatan didikan subuh di aplikasikan dalam bentuk penilaian didikan subuh baik pada tingkat propinsi maupun pada tingkat kabupaten yang di laksanakan setiap tahunnya dan dalam kegiatan penilaian ini lembaga didikan subuh Kabupaten Tanah Datar termasuk lembaga didikan subuh tergiat di Sumatera Barat.

Begitu pentingnya kegiatan didikan subuh di Kabupaten Tanah Datar maka perlu melibatkan semua pihak termasuk kaum perempuan. Untuk melihat lebih lanjut hal

tersebut maka perlu penguatan Peran Perempuan Dalam Pemberdayaan Kegiatan Didikan Subuh yang dilihat dari berbagai aspek

1. Perempuan sebagai anggota "*cadiak pandai*"

Firman Allah SWT dalam surat Al-mujaddallah ayat 11:

*"Allah mengangkat derajat orang yang berilmu diantara kaliah dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat"*⁵

Sesuai dengan pengertian *cadiak pandai* di *Minangkabau*, posisi keilmuan antara kaum laki-laki dengan perempuan ditempatkan pada posisi yang sama. Posisi ini didasarkan pada tingkat pemahaman perempuan tentang agama yang baik, karena mereka menimba ilmu seperti laki-laki menuntut ilmu pada tingkat formal maupun non formal. Karena perempuan ditempatkan sebagai seorang yang *cadiak pandai* maka dalam memberikan materi tambahan dalam kegiatan didikan subuh tidak keluar dari konteks aqidah, syariah dan ibadah serta ilmu pengetahuan umum lainnya. Kemampuan dalam menjalankan amanah sebagai pembimbing didikan subuh ditunjang juga dengan tingkat pendidikan para perempuan yang setara dengan laki-laki sehingga mereka bisa menguasai materi dan cepat menyesuaikan diri dengan kegiatan didikan subuh. Dari data yang ada di Bagian Kesejahteraan Rakyat Kantor Bupati Tanah Datar memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan perempuan Pembina didikan subuh di Kab. Tanah Datar menunjukkan 90% perempuan Pembina didikan subuh di Kab. Tanah Datar adalah lulusan SMU sederajat dan Perguruan Tinggi.

2. Perempuan sebagai "*Bundo Kanduang*" dalam Kegiatan Didikan Subuh

Konteks pengertian *Bundo kanduang* dilekatkan kepada perempuan yang sudah berkeluarga di *Minangkabau* namun dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang *cadiak pandai*, perempuan yang belum berkeluarga tetap mendasari kehidupannya sebagai seorang calon *bundo kaduang* di tempat mereka berada. Peran perempuan di *ranah minang* khususnya di Kabupaten Tanah Datar atau disebut dengan *Luhak Nan Tuo*, sangat signifikan sesuai dengan ungkapan Adat "*Limpapeh Rumah gadang, amban paruik pagangan kunci, pusek jalo kumpulan tali, biasan dalam kampuang, sumarak dalam nagari*" ungkapan adat di atas mengisyaratkan bahwa perempuan di *minangkabau* mempunyai kedudukan yang

⁵ Alqur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia

tinggi di Minangkabau. Kedudukan ini mengisyaratkan bahwa sikap dan tindak tanduk perempuan di minangkabau mencerminkan kualitas akhlak baik di rumah tangga maupun di nagari dan masyarakat. Begitu tingginya kedudukan perempuan di minangkabau maka kegiatan-kegiatan keagamaan di kabupaten Tanah Datar banyak melibatkan perempuan terutama kegiatan didikan subuh. Kegiatan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat tidak mengurugi peran dan fungsi mereka di tengah-tengah keluarga dan kaum. Keberadaan perempuan dalam kegiatan didikan subuh di Kabupaten Tanah disesuaikan dengan ungkapan adat di atas tidak saja sebagai penguat kegiatan tetapi juga menguatkan kegiatan. Ungkapan adat di atas telah dibuktikan dengan lahirnya tokoh-tokoh perempuan di Minangkabau seperti Roehana Koedoes dan Rahmah El-Yunusiah mereka adalah tokoh pendidikan yang dilahirkan di minangkabau mereka adalah tokoh-tokoh yang karyanya masih terlihat sampai sekarang dalam bentuk fisik.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka fungsi perempuan dalam kegiatan didikan subuh dimaksud sebagai berikut:

a. Sebagai suri teladan bagi para santri

Suri teladan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah contoh yang baik. artinya Sebagai seorang pendidik suri teladan merupakan hal mutlak yang dimiliki, hal ini bersifat universal. Kesurituladan ini akan berdampak kepada sikap dan akhlak peserta didik. Sesuai dengan ungkapan dalam minangkabau tentang keteladanan perempuan menurut Zulkarnaini “ *dibias jo budi baiak, malu sopan tinggi sekali, baso jo basi bapakaian, nan gadang basa batuah, hiasan dunia dan akhirat....*”⁶ Makna yang terkandung dalam hal ini adalah perempuan sebagai bundo kanduang merupakan contoh tauladan bagi masyarakat dan rumah tangga, sosok perempuan digambarkan sebagai sosok yang beribawa, arif bijaksana, memakai rasa dan priksa serta tutur kata yang sopan.

Dalam hal tersebut tentunya dalam kegiatan didikan subuh yang dilaksanakan, perempuan menempatkan posisi pada posisi yang mengayom kegiatan anak-anak, dari hasil observasi yang dilaksanakan, guru perempuan/ustazah selalu datang sebelum sholat subuh dilaksanakan, memakai pakaian yang sopan, bertutur kata lembut, serta tegas dalam kelembutannya, memeriksa kelengkapan para santri, mengajak para santri untuk

⁶ Zulkarnaini, “Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah”, Media Dakwah, 2016

melaksanakan sholat sunat, memeriksa kisi-kisi kegiatan setelah sholat subuh dan memastikan para santri masuk ke rumah ibadah dalam keadaan suci dan bersih. seluruh aktifitas tersebut dilakukan tidak saja pada waktu kegiatan didikan subuh tetapi juga dilaksanakan setiap waktu diluar kegiatan didikan subuh.

Sikap dan tingkah laku yang dilakukan perempuan/ustazah dimaksud sebagai lambing kehormatan yang menempatkan mereka pada seorang bundo kanduang yang tidak saja menjadi hiasan dalam bentuk lahiriah tetapi juga hiasan bathinia, yang memahami adat istiadat yang berlaku di daerah masing-masing sehingga dari hasil observasi yang dilakukan banyak perempuan/ustazah ini menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat,

Menurut Usman Qadri apabila seorang ulama perempuan dapat melakukan tugas keulamaan serta tugasnya sebagai seorang perempuan, maka ia akan menjadi perempuan yang baik secara individual dan sosial, serta memperoleh derajat keimanan yang tinggi. Dia memiliki kemampuan mencetak generasi yang handal, kokoh, berkepribadian atas dasar keimanan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan dunia akhirat.⁷

b. Sebagai seorang Pemerhati dan pembimbing

Bagaimana tidak, kegiatan didikan subuh yang dilaksanakan setiap minggu dengan melibatkan para santri yang berumur lebih kurang 5-12 tahun memerlukan penanganan psikologis yang khusus, dan itu hanya bisa dilakukan oleh kaum perempuan yang di kondratkan sebagai orang yang bertugas mendidik anak, artinya kualitas didikan subuh di Kabupaten Tanah Datar juga ditentukan oleh peran perempuan dalam kegiatan tersebut. Anak usia 5-12 perlu mendapat perhatian dari para perempuan/ustazah karena islam dengan universalitas prinsip dan peraturannya memerintahkan kepada pendidik untuk memperhatikan dan senantiasa mengikuti serta mengontrol kegiatan anak-anaknya dari segenap bidang kehidupan, termasuk segi pembelajaran dalam kegiatan didikan subuh yang diperhatikan di bimbing dalam hal ini adalah gerak gerik, dan tinda tanduk. Selama pelaksanaan kegiatan didikan subuh dilaksanakan, lebih jauh, dari bimbingan

⁷ Usman Qadri Makanisi, "Wanita di Mata Nabi:, Tipe Manakah Anda?, (Yogyakarta: Madania, 2010), hlm. 24.

yang diberikan perempuan/ustazah kepada para santri diantaranya: adalah bimbingan dan perhatian dari segi akhlak, perhatian dari segi moral anak, perhatian dari segi mental dan intelektual anak, dari segi jasmani anak, pemerhati dalam psikologis anak dan pemerhati dari segi sosial anak.

Perhatian dan bimbingan yang di laksanakan oleh para perempuan/ustazah yang ada di kabupaten tanah datar diaplikasikan sebagai berikut: a). pemberian *reward* bagi santri yang mempunyai akhlak baik dan menjalankan ibadah sesuai dengan tuntutan yang diberikan, b). bimbingan pelaksanaan kegiatan yang dibebankan kepada kelompok didikan subuh artinya seluruh susunan acara ini adalah tanggungjawab para santri yang dilakukan secara mandiri, baik dilaksanakan satu orang atau lebih. Dan keterlibatan perempuan dalam hal ini sangat diperlukan karena yang tampil adalah para santri yang belum pernah tampil di hadapan khalayak ramai, walaupun dalam kegiatan ini mereka menghadapi komunitas seumuran. c). mendorong para santri untuk berfak sesuai dengan kemampuan masing-masing yang di kelola oleh kelompok kerja para santri. Seluruh kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama antara guru laki-laki dan guru perempuan. , menurut Yuli Amran, wanita memiliki sisi psikologis yang berbeda dengan laki-laki yang memungkinkan mereka bisa sebagai pendidik masyarakat yang ulet⁸. Dalam alquran surat ayat 195 Allah SWT, berfirman yang artinya:

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya(degan berfirman): “sesungguhnya Aku tidak menyia-nyaiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, Karena sebaaian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain”⁹

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Oleh karenanya perempuan mempunyai hal yang sama di hadapan Allah SWT dan mempunyai tanggung jawab yang sama dengan kaum laki-laki, yang memebedakan mereka adalah jenis kelamin dan tugas serta fungsi khususnya ditengah-tengah keluarga dan masyarakat.

⁸ Yuli Amran, “Peran Keluarga, masyarakat dan media sebagai sumber informasi kesehatan reproduksi pada mahasiswa”, Indonesian Journal of Reproductive Health, hlm 16-23

⁹ ibid

3. Perempuan sebagai “*bundo Kanduang* organisasi”

Perempuan yang di jelaskan dalam al-quran juga mempunyai kedudukan yang tinggi sama dengan kaum laki-laki, namun mempunyai peran yang berbeda-beda, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra’ ayat 70 yang artinya:

“sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”

Menurut Khofifah Indar Parawansa, (2013), hakekat kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama di hadapan Allah SWT, yang membuat wanita berkiprah di luar rumah adalah faktor ekonomi dan faktor alternatif, Perempuan, sebagai guru didikan subuh menempati posisi yang sama dengan guru laki-laki, kedudukan ustazah dalam kegiatan ini secara manajemen kegiatan dapat menjadi kepala lembaga didikan subuh yang ada di masjid/mushalla/surau. Manajemen kepemimpinan yang dijalankan tentunya berpedoman kepada hasil musyawarah dan kemufakatan secara bersama, sehingga dalam memimpin lembaga didikan subuh banyak kaum perempuan/ustazah yang berkiprah di kegiatan ini. Menurut kepala kepala bagian kesra Setda Tanah Datar, untuk kepemimpinan lembaga didikan subuh di masjid/mushalla/surau Kab. Tanah Datar tidak membedakan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan, yang terpenting adalah substansi kepemimpinan nya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan didikan subuhs. Dalam mengelola kegiatan subuh baik pada tingkat nagari, kecamatan maupun kabupaten, peran perempuan dalam memimpin organisasi sangat diharapkan. Bahkan ada beberapa posisi kepengurusan yang menempatkan perempuan sebagai *top leadear*.

C. Kesimpulan

Keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan keagamaan di Kabupaten Tanah Datar khususnya dalam kegiatan didikan subuh mempunyai arti yang sangat penting, hal ini berkaitan dengan tanggungjawab moral dan tanggung jawab sosial. Tanggungjawab moral karena mereka berasal dari kaum terdidik yang telah menimba ilmu agama khususnya di berbagai tempat, tanggungjawab sosial karena mereka adalah bagian dari *cadiak pandai* yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola kegiatan-kegiatan keagamaan baik pada tingkat nagari, kecamatan, kabupaten dan propinsi. Penempatan

perempuan di minangkabau ini akan di lihat dari beberapa hal diantaranya; perempuan sebagai anggota “*cadiak pandai*”, Perempuan sebagai “*Bundo Kanduang*” dalam Kegiatan Didikan Subuh, perempuan sebagai “*bundo Kanduang* organisasi”

D. Referensi

- Santoso, Raja Junaidi, (2019) “peran program didikan subuh dalam pengembangan karakter kemandirian beribadah anak”, Jurnal Islamika Vol. 2, No. 2
- Ahmad Kosasi. (2013) “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari”, Jurnal Humanus.
- Alqur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia
- Peraturan Daerah Sumatera Barat No.7 tahun 2018 Tentang Nagari (lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat No.7 tahun 2018)
- Usman Qadri Makanisi (2010) , “Wanita di Mata Nabi:, Tipe Manakah Anda?, Yogyakarta: Madania,
- Wilda Wisnofa Anggraini, Isnarmi,(2018) “Guru Perempuan Dalam Pembentukan Karakter Anak (Studi TPA/MDA Masjid Taqwa Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging)”, Journal of Civic Education Volume 1 No. 3
- Yuli Amran, (2013) “Peran Keluarga, masyarakat dan media sebagai sumber informasi kesehatan reproduksi pada mahasiswa”, Indonesian Journal of Reproductive Health,
- Zulkarnaini,(2016) “Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah”, Sumbar; Media Dakwah

QAWWAM

Journal for Gender mainstreaming

PETUNJUK PENULISAN

Qawwam menerima tulisan dalam bentuk artikel dan laporan penelitian, baik yang menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, maupun Arab, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tulisan tersebut belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan dalam suatu jurnal berkala atau buku.
2. Topik tulisan berkisar pada kajian-kajian yang berkaitan dengan; Kesejahteraan Sosial, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Islam, Pekerjaan Sosial, Layanan Sosial, Kajian Sosial Keagamaan, dan Pembangunan Sosial.
3. Judul tulisan maksimal 14 kata.
4. Semua tulisan harus menyertakan abstrak (100-150 kata) dan kata kunci (3-7 kata).
5. Jumlah halaman antara 15-20 halaman dengan ukuran kwarto spasi ganda dengan menggunakan jenis huruf Arial dan besar huruf 11 pt.
6. Setiap kata arab yang belum resmi terbarukan dalam bahasa Indonesia ditulis mengikuti pedoman transliterasi yang ditetapkan dan cara penulisannya dimiringkan (*italic*), hal ini juga berlaku untuk kata-kata asing yang lain (seperti bahasa Inggris dan bahasa daerah) dan cara penulisan dimiringkan (*italic*).
7. Transliterasi tidak berlaku untuk nama orang, tempat, institusi, dan sejenisnya.
8. Penulis mengirimkan naskahnya atau melakukan *submission* dengan mengikuti prosedur *Open Journal System* (OJS) pada link <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam>
9. Semua tulisan menggunakan referensi model *footnote* dengan teknik penulisan sebagai berikut: Nama Penulis, Judul Buku Yang Ditulis Miring (Kota Penerbit: Nama Penerbit, Tahun Terbit), Nomor Halaman. Sebagai contoh:
 - a. **Buku atau Kitab:**
Spencer Crump, *Fundamental of Journalism*, New York: McGraw Hill Book Company, 1972, 24.
Parada Harahap, *Kemerdekaan Pers*, Jakarta: Akademi Wartawan Press, 1997, 12.
Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan*, Jilid 9, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1992, 67.
 - b. **Buku Terjemahan:**
Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, terj. R. Kaelan dan H. M. Bachrun, Jakarta: Dar al-Kutub Islamiyah, t.t, 563-564.
 - c. **Artikel dalam Buku atau Ensiklopedi:**
Nurcholid Majid, "Cendekiawan dan Penguatan Civil Society di Indonesia" dalam *Peran Cendekiawan Muslim Dalam Menegakkan Hak Politik*

CivilSociety, ed. Tim Editor Masika, Jogjakarta: Bintang Budaya, 1996, 124.

D.S. Adam, "Theology," *Encyclopedia of Religion and Ethics*, ed. James Hastings, Jilid 4, New York: Charles Scribner's Sons, tt, 293.

d. Artikel dalam Jurnal:

Anom Surya Putra, "Pluralisme Wacana Impor yang Henggang dari Realitas," dalam *Jurnal Uloomuna*, Vol. 8 No. 2, Mataram: IAIN Mataram, Desember 1999, 203.

e. Artikel dalam Media Massa:

Andi Aladin, "Global Warming", dalam *Koran Lombok Post*, Edisi 15 Desember 2009, 15.

f. Kitab Suci:

QS. al-Qashash (28): 5. Perjanjian Baru, Yoh (20): 31.

g. Bila mengutip ulang referensi yang sama secara berurut, maka cukup tulis: Ibid. Jika halamannya berbeda, cukup tambahkan nomor halamannya: Ibid., 14.

h. Bila referensi terutip ulang berselang oleh satu atau lebih referensi berbeda, maka cukup tulis *lastname* pengarang berikut satu kata awal judul dari referensi dimaksud. Misalnya, Zahrah, Ushul..., 35.

i. Selain mencantumkan *footnote*, penulis juga harus mencantumkan DAFTAR PUSTAKA, dengan aturan diurutkan secara alfabetis. Nama penulis mendahulukan nama marga atau nama akhir jika nama penulis terdiri dari 2 kata atau lebih, judul buku atau nama jurnal maupun nama media massa ditulis miring (Kota Penerbit: Lembaga Penerbit, Tahun Terbit) tanpa diakhiri tanda titik.

Contoh:

Buku: Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1982.

Jurnal: Ismail, Faisal, "On Developing Liberation Theology in Islam," dalam *Jurnal Gazwatul Fikri*, Vol. 9 No. 2, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Desember 1999.

Media Massa: Aladin, Andi, "Global Warning", dalam *Koran Lombok Post*, Edisi 15 Desember 2009, 15.

Makalah: Sa'i, Muhammad, "Tantangan dan Peluang Alumni Fakultas Dakwah", dalam *Makalah Seminar Prospek Alumni Fakultas Dakwah*, Mataram, 5 Desember 2008.